



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201705716, 21 November 2017
- II. Pencipta
Nama : **Prof. Dr. Rauf A Hatu, M.Si**
Alamat : Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96134
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **Prof. Dr. Rauf A Hatu, M.Si**
Alamat : Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96134
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Buku
- V. Judul Ciptaan : **Sosiologi Pembangunan**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Juli 2014, di Yogyakarta
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- VIII. Nomor pencatatan : 05658

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR HAKCIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001

Rauf A. Hatu

Sosiologi Pembangunan



Sosiologi Pembangunan

Kutipan Pasal 44 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAK CIPTA:

Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyebarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Rauf A. Hatu

Sosiologi Pembangunan



INTERPENA

KATA PENGANTAR



Sosiologi pembangunan secara umum lebih banyak mengkaji persoalan-persoalan pembangunan yang berlangsung di negara-negara berkembang atau lebih banyak kalangan akademis menggunakan istilah pembangunan Dunia ketiga. Menurut Budiman (1995) istilah Dunia Ketiga lebih diartikan sebagai negara-negara yang secara ekonomis masih miskin, atau negara-negara yang masih berkembang, tanpa melihat idiologinya.

Buku ini sebagai pengembangan dari bahan ajar ini bagi mahasiswa Program Studi Sosiologi dan didasarkan pada hal-hal: *Pertama*, kurikulum Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, *Kedua*; kajiannya lebih terfokus pada teori-teori yang berkaitan dengan masalah pembangunan di negara-negara berkembang yang meliputi teori modernisasi, teori ketergantungan, teori dependensi yang kesemuanya itu menjadi unit analisis terhadap kajian sosiologi pembangunan. *Ketiga*; bahan ajar ini diharapkan menjadi inspirasi bagi mahasiswa secara sadar berusaha meningkatkan kemampuan dan kualitas analisis keilmuannya, sehingga dimasa-masa datang mahasiswa dapat memberi kontribusi serta pembobotan terhadap peningkatan keilmuan pada umumnya khususnya dalam mempelajari, mengkaji dan mendalami berbagai permasalahan yang berhubungan dengan sosiologi pembangunan.

Buku ini pula lebih banyak mengadopsi dari tulisan berbagai ahli terutama tulisan Arief Budiman dan Andre Gunder Frank. Penulis menyadari sistematis, kajian materi serta analisisnya belum sempurna sesuai dengan apa yang menjadi harapan bagi yang membaca buku ini, untuk itu melalui kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan pendapat dalam rangka penyempurnaannya atau perbaikan dikemudian hari. Amien. Terima kasih.

Gorontalo, Nopember 2013

Penulis

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	V
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II BEBERAPA KONSEP TENTANG PEMBANGUNAN.....	5
BAB III TEORI MODERNISASI DALAM PEMBANGUNAN	11
BAB IV TEORI PERUBAHAN SOSIAL	25
BAB V TEORI DEPENDENSI.....	55
BAB VI TEORI PEMBANGUNAN KONTEMPORER.....	61
KEPUSTAKAAN.....	65
INDEX.....	67
TENTANG PENULIS	69

BAB I

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya sebuah ilmu akan senantiasa terjaga apabila memiliki manfaat bagi peningkatan serta kecerdasan dan kesejahteraan bagi umat manusia guna memperoleh pengetahuan sesuai dengan perkembangan dan perubahan sebuah zaman¹. Sehingga dengan demikian manusia pada akhirnya senantiasa mampu mengkomunikasikan serta mengaktualkan pengalamannya kepada orang lain demi untuk mencapai kelangsungan dan kesejahteraan serta perkembangan hidup umat manusia.

Perkembangan dan perubahan umat manusia dipengaruhi oleh berbagai dimensi diantaranya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan ketajaman dalam melakukan analisis dari setiap perubahan yang berlangsung dalam dinamika kehidupannya. Untuk memahami semua ini, maka sangat diperlukan sebuah ilmu sosiologi pada umumnya khususnya sosiologi pembangunan dalam melakukan kajian tentang perubahan dan perkembangan masyarakatnya.

Adapun manfaat dari pembelajaran sosiologi pembangunan agar mahasiswa memiliki kemampuan pengetahuan, analisis dalam memahami persoalan-persoalan pembangunan terutama yang berhubungan dengan konsep dasar pembangunan, dimensi pembangunan, pendekatan pembangunan dan teori-teori yang dijadikan sebagai unit analisis dalam setiap perubahan dan perkembangan pembangunan terutama pembangunan di negara-negara berkembang, seperti teori modernisasi (modernisasi menurut Domar dan Harrod, menurut Max Weber, menurut David McClelland, Rostow, Hoselitz dan Inkeles

¹ Koentjaraningrat, Suatu ciri khas pada manusia adalah bahwa ia selalu ingin tahu; dan setelah manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, maka segera kepuasannya disusul lagi dengan kecenderungan untuk lebih tahu lagi. Begitu seterusnya, hingga tak sesaat pun ia sampai pada kepuasan mutlak untuk menerima realitas yang dihadapinya. Metode Penelitian Masyarakat, Penerbit Gramedia Persada utama Jakarta 1994.hal.1. Lihat pula tulisan Jujun Suriasumantri, tentang Ilmu Dalam perspektif Penerbit Yayasan Obor 1995 hal.9.

dan Smith), teori struktural, teori dependensi, serta teori-teori pembangunan kontemporer.²

Pembangunan merupakan suatu fenomena yang tidak habis-habisnya dibahas dalam kerangka kajian keberlangsungan hidup manusia. Fenomena ini melekat sebagai salah satu ciri kehidupan manusia yang kerap mengalami perubahan menurut berbagai dimensi yang ada. Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan³.

Masyarakat Indonesia tidak terlepas dari fenomena pembangunan. Keaneka-ragaman, etnik, ras, kelompok, dan agama dengan bentuk dan tingkat kehidupan yang berbeda dalam masyarakat ini secara langsung maupun tidak langsung mendorong timbulnya perubahan dalam masyarakat sendiri atau menurut orientasinya ke luar masyarakat. Kurangnya komunikasi yang terjadi antara para penentu kebijakan dengan rakyat kebanyakan, menyebabkan model atau bentuk pembangunan yang diterapkan lebih memperlihatkan suatu model '*top-down planning*' yang menurut satu kondisi dianggap lebih baik, namun dari sisi yang lain memberikan dampak yang kurang diharapkan; sejauh perkembangan masyarakat yang ada, ternyata sisi ke dua inilah yang dirasakan lebih memperlihatkan substansinya dalam masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangan lebih lanjut, suatu proses pembangunan dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dasar masyarakat yang terlibat dalam proses ini bisa memenuhi seperangkat kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dari dinamika masyarakatnya. Terpaan dari faktor-faktor ekonomi yang menimbulkan krisis ekonomi pada tahun 1998 yang kemudian mengguncang sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat Indonesia secara

² Teori modernisasi lebih banyak diadopsi dari tulisan Arif Budiman tentang Teori Ketergantungan Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995 hal.16.

³ Pembangunan tidak dapat dianalisis dari satu komponen yang mempengaruhinya, akan tetapi multi kompleks dalam memahami tentang proses pembangunan terutama dalam kajian teoritis dalam tatanan kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang sedang berkembang. Baca Tulisan Selo Soemardjan tentang Perubahan Sosial di Jogjakarta, Penerbit Komunitas Bambu Beji Timur Depok, 2009 hal.xiv

berkelanjutan, seolah-olah memberikan gambaran yang jelas bahwa selama ini belum ada konsep atau bentuk pembangunan yang jelas dalam masyarakat ini; gambaran ini menunjukkan bahwa sedemikian rapuhnya nilai-nilai dasar tentang konsep pembangunan masyarakatnya. Fenomena inilah yang dijadikan dasar untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana peranan teori modernisasi dan teori dependensi dalam melakukan pendekatan terhadap proses pembangunan yang terjadi di Indonesia sebagai Negara berkembang atau Negara dunia Ketiga.

BAB II

BEBERAPA KONSEP TENTANG PEMBANGUNAN

2.1 Pengertian Pembangunan

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, *industrialization*, *economic growth*, *europanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan term *political change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang *multi-interpretable*, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti.⁴ Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya; sering kali, kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi; bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharapkan bagi 'sebagian orang tersingkir' dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya (Budiman, 1995: 1-2).

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus

⁴ Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hal.7

merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material; pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreatifitasnya (Budiman, 1995: 13-14).

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat (Djojonegoro, 1996: 7).

Dalam konteks Indonesia, makna developmentalisme mengalami perkembangan dari konsep ideal tentang sebuah tatanan kesejahteraan masyarakat yang diformulasikan oleh negara-negara Barat. Format kesejahteraan ini kemudian mengalami perdebatan ketika developmentalisme sedikit banyak dipraktekkan ketika zaman Orde Baru berkuasa. Perdebatan ini terjadi karena pada dasarnya makna developmentalisme dan kesejahteraan sangat tergantung dari konteks dimana istilah tersebut digunakan dalam melihat keadaan⁵

Modernization bermakna melakukan formulasi ulang atas sesuatu yang asalnya primitif atau tradisional, menuju kondisi yang lebih baik secara fisik. Pengertian ini menekankan adanya perubahan atau pertambahan bentuk fisik dari kondisi asalnya. *Empowering* bermakna upaya memberdayakan sesuatu untuk lebih berdaya lagi dari kondisi sebelumnya. Titik tekan istilah ini ada terletak pada penambahan kemampuan yang dimiliki oleh obyek proses *empowering*. Jika ada seorang manusia yang asalnya hanya mampu membaca dan memahami sepuluh lembar tulisan dalam satu jam, lalu melalui proses tertentu kemampuan tersebut bertambah menjadi seratus lembar tulisan dalam satu jam, maka ilustrasi tersebut dapat dikategorikan sebagai akibat *empowering*.

Industrialization identik dengan istilah industrialisasi. Term ini bermakna perubahan atau peralihan orientasi mata pencaharian dari yang bersifat agraris atau bercocok tanam menuju bentuk pekerjaan industri. Manusia tidak lagi memposisikan dirinya untuk tergantung penuh pada produk jadi alam dalam memenuhi kebutuhannya, namun lebih pada pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendapatkan kebahagiaan dengan kemampuan teknologi yang dimiliki manusia.

⁵ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002) hal. 12-13

Economic growth dapat diartikan dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika berbicara tentang pembangunan, maka tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kemampuan ekonomi dari manusia yang menjadi pelaku pembangunan itu sendiri. Muara dari *economic growth* adalah kemakmuran yang juga dapat menjadi tanda bahwa pembangunan telah berhasil dilakukan.

Term *europanization* muncul sebagai dampak konsep pembangunan yang diterapkan di Indonesia, bahwa kiblat kemajuan adalah negara-negara Eropa. Jika Indonesia ingin mencapai kemajuan atau kemakmuran yang diinginkan, maka Indonesia harus meniru negara-negara Eropa, karena disanalah letak kemajuan tersebut. Jadi, upaya imitasi gaya hidup tersebut menjadi bagian dari terminologi *europanization* di Indonesia. Istilah ini juga dekat dengan *westernization* atau kebarat-baratan. *Political change* adalah perubahan politik. Artinya, perubahan kondisi politik sebuah negara akan membawa dampak pada arah pembangunan yang dilakukan di negara tersebut, sehingga sekecil apapun pengaruhnya, perubahan politik akan ikut mewarnai orientasi, langkah dan model pembangunan yang sedang berjalan di sebuah negara tertentu.

Dari beberapa penelusuran makna pembangunan secara kebahasaan tersebut, dapat ditentukan beberapa nilai dasar dari konsep pembangunan meliputi hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, pembangunan mengandung makna proses. Ada tahapan-tahapan atau proses tertentu yang harus dilalui ketika pembangunan tersebut dilakukan. Daur proses itupun dapat dimulai melalui satu titik dan berakhir pada titik lain, lalu dimulai lagi dari titik awal dimana sebelumnya telah dimulai.⁶ *Kedua*, pembangunan mengandung arti perubahan menuju arah yang lebih baik. Ada pertambahan nilai (*value*) dan guna (*utility*) dari obyek pembangunan. Dalam hal ini, dapat juga dikatakan bahwa ada tujuan dan target tertentu dalam pembangunan. *Ketiga*, terdapat subyek, metode dan obyek dalam pembangunan. Ada subyek yang melakukan pembangunan, ada rangkaian langkah yang menjadi panduan, dan terdapat juga obyek atau sasaran pembangunan.

⁶ Meminjam istilah Thomas Kuhn dalam pemikiran ilmu-ilmu sosial yang mengibaratkan bahwa ada daur paradigma yang lebih dapat dikatakan sebagai siklus dalam khazanah teori-teori sosial. Siklus paradigma tersebut suatu saat akan berubah dan berhenti pada satu format, untuk selanjutnya memulai kembali rotasi perubahannya. Lihat George Ritzer, *Sociologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997) h. 15

2.2. Dimensi Pembangunan

Dimensi pembangunan adalah *subject matter* yang menjadi kawasan garapan dari pembangunan. Sebagai sebuah upaya menambah nilai dan guna sesuatu menjadi lebih baik, pembangunan memiliki sekian banyak bidang garapan yang saling terkait, namun tidak dapat disatukan dalam sebuah kawasan kajian secara makro semata-mata. Ada perspektif mikro yang sangat tergantung pada – meminjam istilah Antropologi—*locus spehre*-nya masih-masing.

Dimensi-dimensi inilah yang menjadi rel dan bidang garapan dari sekian banyak upaya peningkatan kemakmuran masyarakat sebuah negara yang menerapkan pembangunan. Ada *grand goal* yang dicanangkan tiap pelaku pembangunan dalam melakukan aktifitasnya, namun ada juga *specific goal* dalam pembangunan yang berada dalam dimensi atau kawasan tertentu. Kesemuanya memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, namun keterkaitan tersebut tidak secara langsung menafikan spesifikasi orientasi masing-masing dimensi. Pelaku pembangunan seringkali menentukan standar keberhasilan dari aktifitas yang mereka lakukan untuk mencapai *goal of development*. Standar tersebut akan dapat di-*breakdown* dari sekian banyak indikator pertambahan kemajuan dari dimensi-dimensi pembangunan yang telah dicanangkan sebagai sasaran. Keberhasilan sebuah pembangunan akan dapat dilihat dan diukur dari indikator-indikator tersebut, sehingga pembangunan memiliki kejelasan orientasi dan target yang dapat dinilai secara riil. Adapun dimensi pembangunan dapat dikategorikan dalam wilayah ekonomi, kesehatan, pendidikan, sumberdaya manusia, hukum, politik, sarana, dan keadilan masyarakat secara umum.

1.3. Problem Pembangunan

Musuh utama yang dihadapi oleh pembangunan adalah keterbelakangan, ketidakberdayaan, ketergantungan, kebodohan, rendahnya kesehatan yang semuanya bermuara pada kemiskinan. Semua negara pernah atau bahkan sedang berjuang menghadapi sekian banyak problem tersebut, disamping masih banyak lagi problem turunan lagi yang bergelayut pada tiap kawasan negara tertentu.

"*What does poverty happen*", adalah pertanyaan yang paling mendasar ketika membicarakan kemiskinan yang menjadi pekerjaan rumah dari pembangunan. Minimal ada dua penjelasan/pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat asal mula munculnya kemiskin-

an di beberapa negara, terutama di negara Dunia Ketiga. Pendekatan pertama menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena ditentukan oleh faktor yang ada didalam sebuah negara itu sendiri. Cara berpikir seperti ini lebih banyak dikenal dengan pendekatan internal dalam menjelaskan problem kemiskinan dalam pembangunan.

Kesalahan utama atas terjadinya kemiskinan adalah karena yang menyangkut kemiskinan itu sendiri dan menafikan keberpengaruh-an pihak luar yang menyebabkan kemiskinan terjadi. Pendekatan ini melahirkan teori modernisasi. Pendekatan kedua menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena faktor eksternal yang memasuki atau mempengaruhi sebuah negara. Ada upaya-upaya dari luar negara atau masyarakat tertentu yang secara sengaja menyebabkan terjadinya kemiskinan, sehingga pendekatan ini lebih dikenal dengan pendekatan eksternal. Latar belakang inilah yang kemudian memunculkan teori pembangunan struktural.

BAB III

TEORI MODERNISASI DALAM PEMBANGUNAN

3.1. Teori Modernisasi

Teori modernisasi (dan teori konvergensi) lahir sebagai produk pasca perang dunia II. Teori ini dirumuskan untuk menjawab permasalahan baru yang terkait dengan pembagian masyarakat dunia ke dalam tiga dunia yang berbeda. Dunia pertama; adalah masyarakat industri maju yang meliputi Eropa Barat, Amerika Serikat yang kemudian disusul dengan Jepang dan negara-negara industri baru Timur Jauh. Dunia kedua meliputi masyarakat sosialis totaliter yang didominasi oleh Uni Sovyet, yang menempuh industrialisasi dengan biaya sosial yang besar. Sedangkan dunia ketiga terdiri dari masyarakat post kolonial di Selatan dan Timur yang terbentang dan tenggelam dalam era agraris dan pra industri. Teori modernisasi klasik memfokuskan perhatian kepada perbedaan antara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga. Menurut Szompka (2005) teori modernisasi dan konvergensi sangat populer pada tahun 1950-an dan pertengahan tahun 1960-an Tokoh-tokoh teori modernisasi antara lain Liner, Everret Hegen, Talcott Parsons dan Eisenstadt. Boleh dikatakan teori modernisasi dan konvergensi ini merupakan bentuk terakhir Evolucionisme (teori evolusi) yang mencoba menjelaskan perubahan "dunia kurang maju" ke "dunia yang lebih maju". (Kanto, 2006).

Asumsi kedua teori terori tersebut adalah: (a) perubahan bersifat unilinier, dimana masyarakat yang kurang maju cenderung mengikuti jalan yang sudah ditempuh oleh masyarakat yang lebih maju, (b) arah perubahan tak dapat berubah dan bergerak ke arah modernitas sehingga tujuan akhir dari proses perkembangan seperti halnya dengan masyarakat Barat yang industrialis, kapitalis dan demokratis, (c) perubahan terjadi secara bertahap, meningkat dan relatif tanpa gangguan, (d) proses perubahan terjadi menurut tahap yang berurutan dan tidak ada tahapan yang dilompati, sebagaimana tahap perubahan yang digambarkan oleh Rosstow, (e) memusatkan perhatian kepada

faktor penyebab internal baik yang berupa diferensiasi struktural dan fungsional maupun peningkatan daya adaptasi, (f) perubahan bersifat progresif dengan keyakinan bahwa proses modernisasi mampu menciptakan perbaikan kehidupan sosial secara universal dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Teori modernisasi menganggap bahwa pada umumnya negara-negara terbelakang akan menempuh jalan yang sama dengan industri maju di Barat sehingga kemudian akan menjadi negara berkembang pula melalui proses modernisasi (Light, dkk, 1989). Teori ini berpendapat bahwa pada hakekatnya masyarakat yang belum berkembang perlu mengatasi berbagai kekurangan dan masalahnya sehingga dapat mencapai tahap "tinggal landas" (*take-off*) ke arah suatu perkembangan ekonomi.

Menurut Etzioni-Halevy dan Etzioni (1973) transisi dalam keadaan tradisional ke modernitas melibatkan revolusi demografi yang ditandai menurunnya angka kematian dan angka kelahiran, menurunnya ukuran dan peran dan pengaruh keluarga, terbukanya sistem stratifikasi, peralihan dari struktur feodal atau kesukuan ke suatu birokrasi, menurunnya pengaruh agama, beralihnya fungsi pendidikan dari keluarga dan komunitas ke sistem pendidikan formal, munculnya kebudayaan massa, dan munculnya perekonomian pasar dan industrialisasi. Moore (David, 1990) memandang modernisasi merupakan transformasi "total" masyarakat tradisional atau pra-modern ke dalam tipe teknologi dan organisasi sosial terkait yang mensiasati bangsa maka sejahtera secara ekonomi, dan relatif stabil secara politik. Pandangan Moore sama dengan Raillon (1989) bahwa: "modernisasi merupakan suatu proses dimana berlangsung transformasi di segala bidang seperti bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial kultural dan lain-lain, dimana berbagai perubahan-perubahan yang merombak dasar, susunan dan corak masyarakat lama, yang statis dan terkebelakang yang bersifat tradisional agraris dan sebagai akibat perubahan, lahirilah masyarakat baru, yang dinamis dan progresif yang bersifat industrial rasional".

Bagi ahli seperti Apter (Lauer, 1993) memandang modernisasi sebagai proses non-ekonomi dimulai bila kebudayaan mewujudkan sikap menyelidik dan mempertanyakan tentang bagaimana manusia membuat pilihan moral (atau normatif), sosial (atau struktural) dan personal (atau perilaku). Sedangkan Pool (Lauer, 1993) melihat

modernisasi sangat luas artinya, mencakup proses memperoleh citra (*images*) baru seperti citra tentang arah perubahan atau citra tentang kemungkinan perkembangan.

Selain itu Black (David dan Mark, 1990) memandang modernisasi sebagai suatu proses yang dengan proses itu lembaga-lembaga yang berkembang secara historis beradaptasi pada fungsi-fungsi yang berubah dengan cepat yang menggambarkan peningkatan pengetahuan manusia, yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memungkinkan manusia mengendalikan lingkungannya dan menghasilkan revolusi ilmu pengetahuan. Menurut Budiman (1996) modernisasi didasarkan pada faktor non material penyebab kemiskinan, khususnya dunia ide atau alam pikiran. Faktor ini menjelma dalam pikiran psikologi dari setiap individu, atau nilai-nilai kemasyarakatan yang menjadi orientasi dalam memberikan arah kepada tingkah lakunya.

Faktor non material atau ide yang di anggap sebagai faktor yang mandiri, dan biasa dipengaruhi secara langsung melalui hubungan dengan dunia ide yang lain. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu cara yang sangat penting untuk mengubah psikologi seseorang atau nilai-nilai budaya masyarakat. Meskipun terdapat sejumlah ciri-ciri, pandangan serta perbedaan ahli terhadap modernisasi, namun pandangan yang demikian itu pada akhirnya tetap bermuara pada arti modernisasi. Lirner (Lauer, 1993) memandang ciri-ciri kemoderenan sebuah masyarakat tersebut meliputi komponen-komponen (1) Tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut sendiri, setidaknya tingkat pertumbuhan yang cukup untuk meningkatkan produksi maupun konsumsi secara tetap; (2) Kadar partisipasi rakyat dalam pemerintahan yang memadai; (3) Difusi norma-norma sekuler-rasional dalam kebudayaan; (4) Peningkatan suatu mobilitas dalam masyarakat dan (5) Transformasi keperibadian individu, sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam tatanan sosial yang sesuai dengan tuntutan kemodernan.

Selanjutnya Halivaland (1988) mengemukakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan kultural dan sosio-ekonomis dimana masyarakat-masyarakat sedang berkembang memperoleh sebagian karakteristik dari masyarakat industri barat. Ada asumsi bahwa proses modernisasi adalah proses pembaratan masyarakat atau menjadikan masyarakat Timur sama dengan masyarakat barat, dan apabila tidak mengikuti pola pemikiran barat berarti ketinggalan zaman dan kuno, sesungguhnya anggapan yang demikian itu terlalu etnosentrisme.

Modernisasi berdampak pada sebagian atau seluruh sektor kehidupan masyarakat. Lauer (1993) memandang paling tidak berdampak nyata pada perubahan beberapa aspek yakni aspek: demografi, sistem stratifikasi, pemerintahan, pendidikan, sistem keluarga, serta nilai sikap dan keperibadian.

Pertama; Perubahan di bidang demografi akibat modernisasi misalnya terjadi pertumbuhan penduduk sebagai akibat menurunnya angka kematian, meningkatnya arus mobilitas tenaga kerja dari desa ke kota (dari sektor agraris ke sektor industri) serta meningkatnya usia harapan hidup.

Kedua; Perubahan dalam sistem statifikasi sosial juga terjadi selama berlangsungnya proses modernisasi. Menurut Kanto (2006) tanda-tanda perubahan tersebut tampak dalam hal-hal seperti (a) pembagian kerja menjadi semakin kompleks bersamaan dengan meningkatnya spesialisasi, (b) status sosial yang dulunya berorientasi pada asripsi atau keturunan (*ascribed status*) cenderung berubah berdasarkan atas prestasi (*achieved status*), (c) alat yang memadai untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan dari orang-orang yang terlibat dalam proses produksi menjadi perhatian utama, (d) peranan pekerjaan bergeser dari kegiatan yang memberikan kepuasan ke peran sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan (e) imbalan (*reward*) yang tersedia untuk didistribusikan meningkat, (f) imbalan (*reward*) didistribusikan dengan cara lebih adil, (g) terjadi pergeseran peluang kehidupan berbagai strata sosial, (h) terjadinya pergeseran dalam distribusi gengsi sosial, (i) pergeseran dalam masalah serupa juga terjadi dalam distribusi kekuasaan.

Ketiga; Perubahan dalam sistem pemerintahan juga terpengaruh oleh modernisasi. Kepentingan dan loyalitas kedaerahan hingga taraf tertentu digantikan kepentingan dan loyalitas nasional. Juga terjadi perkembangan demokratisasi dalam politik, kekuasaan politik cenderung terdistribusi semakin luas diberbagai lapisan masyarakat, kendatipun tingkatannya tidak sama baik antara negara maupun antar masyarakat.

Keempat; perubahan dibidang pendidikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kanto melihat (2006) perubahan pendidikan secara kuantitatif terjadi perkembangan jumlah lembaga pendidikan dan jumlah pelajar dan mahasiswa sedangkan secara kualitatif, diantaranya pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang

memiliki keahlian dan profesionalitas agar masuk ke pasar kerja yang semakin terspesialisasi. *Kelima*; perubahan dalam kehidupan keluarga. Pengaruh kehidupan diperkotaan yang modern berpengaruh nyata terhadap perubahan kehidupan keluarga pedesaan yang tradisional dan agraris. Hal ini dimungkinkan karena interaksi antara desa dengan kota semakin intensif. *Keenam*; Modernisasi juga memberi kontribusi terhadap terjadinya perubahan berbagai pranata sosial di pedesaan. Pranata sosial yang dulunya bersifat solidaritas sosial dan kekeluargaan cenderung berubah ke arah orientasi individual dan efisiensi.

Jika asumsi ini yang dipakai, maka akan terjadi penafsiran yang keliru dalam melihat perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sebab perubahan dalam masyarakat diharapkan pada proses perubahan orientasi berpikir ke arah yang lebih maju atau adanya perubahan pola hidup dari kehidupan sebelumnya. Untuk tidak menimbulkan berbagai tafsiran yang keliru terhadap perubahan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari proses modernisasi, maka Haviland (1988) mengemukakan beberapa sub-proses terhadap modernisasi yaitu: (1); perkembangan teknologi dalam proses modernisasi, pengetahuan dan teknik tradisional yang sederhana terdesak oleh penerapan pengetahuan ilmiah dan teknik yang pada intinya dipinjam dari barat. (2), pengembangan pertanian, yang berupa pergeseran dari pertanian untuk keperluan sendiri menjadi pertanian untuk pemasaran. Orang tidak membudi dayakan tanaman dan hewan untuk keperluan sendiri, tetapi mereka makin lama banyak mengadakan budi daya untuk dipasarkan, dengan lebih banyak bersandar kepada ekonomi uang dan pasar untuk mengadakan pembelian-pembelian. (3); ialah industrialisasi, dengan lebih mengutamakan bentuk energi non hewani (*inanimate*), khususnya bahan bakar fosil. Tenaga manusia dan hewan menjadi kurang penting, seperti halnya dengan kerajinan. (4) urbanisasi, yang ditandai oleh perpindahan penduduk dari pemukiman pedesaan ke kota-kota

Teori Rostow tentang tahapan proses pembangunan dalam masyarakat ini dipaparkan dalam bukunya yang berjudul: *The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto*, yang terbit pada tahun 1960. Seperti halnya pendapat para ahli ekonomi pada masa itu, Rostow berpendapat bahwa pembangunan merupakan proses yang bergerak secara linier, dari masyarakat terbelakang menuju

masyarakat maju dan modern. Menurut Rostow, proses pembangunan melalui lima tahap, secara ringkas dikemukakan sebagai berikut:

1. Masyarakat Tradisional

Ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang. Dengan demikian, penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan juga sangat terbatas, sehingga pemikirannya lebih dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan di luar kekuasaan manusia. Akibatnya, produktivitas sangat terbatas. Masyarakat bersifat statis sehingga perubahan sosial berjalan sangat lambat. Produksi cenderung habis untuk konsumsi, persediaan modal terbatas sehingga sedikit atau hampir tak ada investasi.

2. Prakondisi Lepas Landas

Perubahan mulai terjadi dengan adanya pengaruh eksternal, misalnya ikut campur tangannya masyarakat yang lebih maju. Ide-ide pembaharuan mulai masuk, masyarakat mulai berkembang dan bergerak menuju tahap prakondisi untuk lepas landas. Syarat-syarat yang diperlukan untuk proses industrialisasi mulai tampak. Kegiatan meningkatkan tabungan mulai terjadi yang selanjutnya dapat dipakai untuk investasi pada sektor-sektor produktif, termasuk investasi untuk pendidikan. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan peningkatan produktivitas berkembang secara signifikan. Kondisi sosial-politik semakin stabil dan dikendalikan oleh pemerintahan pusat yang kuat.

3. Lepas Landas

Periode ini ditandai dengan berkurangnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Tabungan dan investasi meningkat, demikian juga sektor industri mulai berkembang pesat. Sebagian besar keuntungan yang diperoleh diinvestasikan untuk industri dan pabrik-pabrik baru. Di pihak lain, terjadi perkembangan teknologi pertanian. Usaha pertanian bukan sekedar untuk tujuan konsumtif, tetapi juga bermotif komersil untuk memperoleh keuntungan. Pengembangan sektor pertanian mutlak dilakukan pada periode lepas landas karena sangat diperlukan untuk mendukung sektor industri dan proses modernisasi.

4. Bergerak ke kedewasaan

Penerapan teknologi modern terjadi di seluruh sektor perekonomian. Periode ini ditandai dengan proses kemajuan yang terus

bergerak ke depan, kendatipun kadang-kadang terjadi pasang surut. Sebagian kecil pendapatan nasional diinvestasikan kembali untuk mengatasi persoalan pertumbuhan penduduk. Sektor industri dan jasa berkembang pesat. Negara memantapkan posisinya dalam perekonomian global/internasional

5. Era konsumsi massa yang tinggi

Pendapatan masyarakat terus meningkat. Konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok, melainkan sudah meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Produksi industri juga berubah dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang konsumsi yang tahan lama. Pada tahap terakhir ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan paling utama. Surplus ekonomi cenderung dialokasikan untuk kesejahteraan sosial dan penambahan dana sosial. Pasca periode ini, pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan mampu menopang kemajuan secara berkelanjutan.

Sebagaimana teori-teori modernisasi lainnya, teori Rostow ini juga didasarkan atas dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Titik terpenting dalam gerak kemajuan ini adalah periode lepas landas. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam proses modernisasi diperlukan kelompok wiraswastawan yang berani melakukan tindakan pembaharuan kendatipun ada risikonya. Menurut Rostow, terdapat dua kondisi sosial yang mampu melahirkan wiraswastawan, yaitu: ada elit baru dalam masyarakat yang merasa diingkari haknya oleh masyarakat tradisional untuk mendapatkan prestise dan kekuasaan. masyarakat tradisional cukup fleksibel untuk memberi peluang kepada warganya mencari kekayaan atau kekuasaan politik sebagai cara untuk meningkatkan status sosialnya.

Dari beberapa konsep tentang modernisasi di atas, bagaimana konsep tersebut dengan konsep pembangunan pedesaan khususnya pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan serta mensejahterakan kualitas hidup petani. Dalam usaha tersebut diperlukan adanya partisipasi petani dan masyarakat, sehingga peningkatan produksi komoditas pertanian dapat dicapai lebih efisien dan dinamis dengan diikuti pembagian surplus ekonomi antar pelaku secara adil. Sehubungan dengan hal ini, Kasryno (2002) mengidentifikasi bahwa strategi pem-

bangunan pertanian merupakan peningkatan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia (*human capital*) masyarakat pertanian, meningkatkan penguasaan aset produktif pertanian, inovasi baru dan menata kembali kebijakan pembangunan ekonomi dan pengembangan kelembagaan pertanian dalam arti yang lebih luas.

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian dan pedesaan adalah produktivitas tenaga kerja dan penguasaan aset produktif yang rendah disertai adanya dualisme antara pertanian rakyat yang tradisional dan perusahaan besar yang maju dan modern serta dualisme antara kota dan desa. Kondisi ini menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat dan tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan, oleh karena itu, pembangunan pertanian harus berorientasi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani di pedesaan.

Jika mengkaji tentang pembangunan di Indonesia, maka teori modernisasi merupakan teori yang paling dominan menentukan wajah pembangunan di Indonesia. Ada dua teori besar yang mempengaruhi teori Modernisasi, yaitu teori evolusi dan teori fungsional. Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana asumsi teoretis teori Modernisasi dan implikasinya bagi pembangunan di Indonesia. Asumsi teori modernisasi merupakan hasil dari konsep dari metafora teori evolusi. Menurut teori evolusi, perubahan sosial bersifat linear, terus maju dan perlahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitive menuju ke tahapan yang lebih maju. Berdasarkan asumsi tersebut, maka para teoretikus perspektif modernisasi membuat kerangka teori dan tesis dengan ciri-ciri sebagai berikut:

Pertama, modernisasi merupakan proses bertahap. Teori Rostow tentang tingal landas membedakan berbagai fase pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai oleh masyarakat, diawali dengan masa primitif dan sederhana menuju masyarakat menuju dan berakhir pada tatanan yang maju dan kompleks. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Indonesia, pada saat teori modernisasi digulirkan, Indonesia masih dalam suatu kondisi yang sangat memprihatinkan sebagai produk jajahan. Masyarakat yang tradisional dan belum bersentuhan dengan dunia teknologi dan tatanan hidup yang kompleks. Pada saat awal negara Indonesia merdeka, kondisi Indonesia dapat dikatakan sebagai bangsa yang primitive. Kemudian pada saat Indonesia memulai dengan babak baru, yaitu pada masa Orde Baru, maka pada saat inilah

adopsi terhadap konsep modernisasi dimulai. Seperti sudah dipahami oleh banyak pihak, bahwa pembangunan di Indonesia memang sangat bernuansa teori modernisasi, hal ini tidak mengherankan karena sebagian besar konsultan pembangunan Indonesia merupakan ahli di bidang teori Modernisasi. McClelland merupakan salah satu contoh konsultan pembangunan Indonesia yang banyak mewarnai proses pembangunan di Indonesia.

Kedua, modernisasi sebagai proses homogenisasi. Tidak terbantahkan bahwa proses modernisasi merupakan sebuah proses yang menuntut kesamaan dan kemiripan, dan hal ini menjadi indikator bahwa proses pembangunan dikatakan berhasil. Proses homogenisasi ini terjadi dalam beberapa tingkat, yang pertama homogenisasi internal, yaitu homogenisasi yang terjadi di dalam negara tersebut. Artinya, diantara masyarakat sudah tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial. Yang kedua adalah homogenisasi eksternal yaitu kemiripan dan kesamaan antara negara maju dan negara berkembang. Watak homogenisasi ini merupakan salah satu target para pemikir teori Modernisasi untuk melaksanakan pembangunan secara efektif. Walaupun dengan watak tersebut, modernisasi menghadapi kritik yang besar, bahwa ternyata ide homogenisasi ini hampir tidak mungkin untuk bisa terwujud. Karena proses transfer budaya antara negara maju dan negara berkembang, merupakan transfer yang evolutif sehingga hal ini membutuhkan waktu yang relative lama untuk dapat mewujudkan target homogenisasi.

Ketiga, modernisasi merupakan proses *Eropanisasi* dan *Amerikanisasi* atau yang lebih populer bahwa modernisasi itu sama dengan barat. Hal ini terlihat bahwa keberhasilan itu merupakan sesuatu yang bersifat barat. Negara barat merupakan negara yang tak tertandingi dalam kesejahteraan ekonomi dan politik. Dan negara maju ini dijadikan mentor bagi negara berkembang. Dalam hal yang lebih nyata, kebijakan industrialisasi dan pembangunan ekonomi sepenuhnya mencontoh hal-hal yang dilakukan negara maju tanpa memperhatikan factor budaya dan sejarah lokal negara berkembang. Walaupun, saat ini negara maju sedang mengalami krisis ekonomi yang dahsyat dan kenyataannya negara berkembang masih belum terimbas secara besar-besaran. Hal ini menunjukkan bahwa teori Modernisasi sedang menghadapi kritik yang hebat. Perbaikan terhadap teori Modernisasi terutama praktek-praktek pembangunan di negara berkembang perlu dilakukan.

Keempat, modernisasi merupakan proses yang tidak mundur. Proses modernisasi merupakan proses yang tidak bisa dihentikan ketika sudah mulai berjalan. Dengan kata lain ketika sudah melakukan kontak dengan negara maju maka dunia ketiga tidak mampu menolak proses selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dalam proses bagaimana negara berkembang terus menerus meminta bantuan negara maju untuk dapat membantu baik secara financial maupun intervensi kebijakan politik. Hanya sedikit dari negara dunia ketiga yang melakukan penolakan terhadap asumsi yang keempat dari teori Modernisasi ini, yaitu Korea Utara dan Iran yang secara tegas menolak intervensi yang dilakukan negara maju.

Kelima, modernisasi merupakan perubahan progresif. Hal ini memang diterima oleh para pemikir pembangunan, namun demikian efek samping dari proses ini merupakan suatu proses yang memakan banyak korban yang secara sosial tentu saja berbiaya mahal. Sebagai contoh pada saat pembuatan waduk Kedungombo, maka masyarakat sekitar Kedungombo merupakan elemen yang paling dikorbankan dan ongkos sosial yang juga semakin mahal. Belum lagi contoh-contoh proses modernisasi yang melibatkan atau mengorbankan banyak orang, paling mudah dilihat adalah proses pembuatan jalan tol di Jawa yang tentu saja akan mengeluarkan ongkos sosial yang tidak sedikit.

Keenam, modernisasi memerlukan waktu panjang. Karena modernisasi merupakan proses evolusioner, sehingga perubahan yang dapat dilihat juga tidak serta merta cepat. Dengan demikian, dibutuhkan waktu yang lama untuk melihat perubahan yang dialami, bahkan membutuhkan waktu antar generasi untuk melihat seluruh proses yang dijalankan modernisasi, termasuk akibat yang dialami proses modernisasi.

Jika tilikan modernisasi didasarkan atas teori fungsional, maka teori modernisasi mengandung asumsi bahwa modernisasi merupakan proses sistematis, transformasi, dan terus-menerus. *Pertama*, sebagai proses sistematis. Proses modernisasi merupakan proses melibatkan seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, sekularisasi, sentralisasi. Dan hal ini membentuk wajah modernisasi sebagai sebuah bentuk yang teratur disbanding sebuah proses yang tidak beraturan. *Kedua*, sebagai proses transformasi. Proses ini memberi arti atau makna bahwa modernisasi merupakan proses yang membentuk dari sebuah kondisi tradisional menjadi modern dalam segala aspek sosial budaya. *Ketiga*, sebagai proses yang

terus-menerus. Proses modernisasi melibatkan perubahan sosial yang terus-menerus. Sekali perubahan sosial terjadi, maka aspek sosial yang lainnya juga akan ikut terpengaruh. Selanjutnya, akan dibahas tentang teori-teori pilihan yang termasuk dalam teori Modernisasi.

3.1.1 Harrod-Domar: Tabungan dan Investasi

Teori Harrod-Domar merupakan salah satu teori yang terus dipakai dan terus dikembangkan. Teori ini dicetuskan oleh Evsey Domar dan Roy Harrod, yang bekerja terpisah namun menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi masyarakat rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga rendah. Hal ini bisa dijumpai pada negara maju dan berkembang, masyarakat di negara maju merupakan masyarakat yang memiliki investasi yang tinggi yang diwujudkan dalam saham, danareksa, indeks, dan bentuk investasi yang lain. Contoh paling dekat dapat dilihat bagaimana masyarakat Singapura memiliki tingkat investasi yang tinggi dibanding negara-negara di Asia Tenggara.

Asumsi yang mendasari teori ini bahwa masalah pembangunan pada dasarnya adalah masalah investasi modal. Jika investasi modal sudah berkembang baik, maka pembangunan ekonomi negara tersebut juga akan berkembang baik. Maka, salah satu implikasi dalam pembangunan yang dilaksanakan pada Negara-negara berkembang seperti di Indonesia, pemerintah mendorong penanaman investasi dan hal membuat investasi tumbuh subur di Indonesia. Pemerintah Indonesia berpijak dari teori Harrod-Domar, sampai membuat suatu lembaga Penanaman Modal Nasional, karena langkah ini dianggap sebagai langkah strategis untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Walaupun demikian, terjadi suatu ironi yang terjadi di Indonesia, ketika penanaman modal dilakukan secara massal oleh negara asing dan membeli aset strategis yang dimiliki oleh bangsa. Alih-alih menarik investasi agar besar, yang terjadi adalah penggerogotan aset negara. Maka dari itu, salah satu kritik terhadap teori ini bahwa teori sangat mengedepankan pertumbuhan ekonomi. Salah satu aspek yang tidak dibahas adalah aspek manusia, karena menurut Harrod-Domar yang penting adalah menyediakan modal, masalah manusia setiap negara sudah memilikinya. Implikasinya, pengembangan kualitas manusia tidak menjadi perhatian Harrod-Domar.

3.1.2 Max Weber: Etika Protestan

Teori Weber tertarik untuk membahas masalah manusia yang dibentuk oleh budaya di sekitarnya, khususnya agama. Weber tertarik untuk mengkaji pengaruh agama, pada saat itu adalah protestanisme yang mempengaruhi munculnya kapitalisme modern di Eropa. Pertanyaan yang diajukan oleh Weber adalah mengapa beberapa negara di Eropa dan Eropa mengalami kemajuan yang pesat di bawah sistem kapitalisme. Setelah itu, Weber melakukan analisis dan mencapai kesimpulan bahwa salah satu penyebabnya adalah Etika Protestan.

Kepercayaan atau etika protestan menyatakan bahwa hal yang menentukan apakah mereka masuk surga atau masuk neraka adalah keberhasilan kerjanya selama di dunia. Apabila dia melakukan karya yang bermanfaat luas maka dapat dipastikan bahwa dia akan mendapatkan surga setelah mati. Semangat inilah yang membuat orang protestan melakukan kerja dengan sepenuh hati dan etos kerja yang tinggi. Dengan demikian, seluruh pekerjaan yang dilakukan akan serta-merta menghasilkan surga dan agregat semangat individual inilah yang memunculkan kapitalisme di Eropa dan Amerika.

Hasil penelitian Weber ini merupakan penelitian pertama yang menghubungkan antara agama dan pertumbuhan ekonomi. Dan jika diperluas, maka agama bisa menjadi sebuah kebudayaan dan hal ini kemudian merangsang penelitian mengenai bagaimana hubungan antara kebudayaan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, istilah Etika Protestan ini menginspirasi Robert Bellah yang menulis tentang agama Tokugawa yang ada di Jepang dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Jepang, hal itu bisa dilihat bagaimana tingginya pertumbuhan ekonomi di Jepang. Hal ini tentu saja relevan jika diterapkan di Indonesia, bahwa semangat agama di Indonesia dapat mendukung, mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3.1.3. David McClelland: Dorongan Berprestasi

Pertanyaan besar yang dimunculkan oleh McClelland adalah apakah yang menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan pada banyak masyarakat di dunia. McClelland sangat terpengaruh oleh pandangan Weber dalam Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang memandang bahwa semangat kapitalisme sangat dipengaruhi oleh nilai individual yang dimiliki oleh seseorang. Dasar ini menjadi sangat penting dalam pengembangan teorinya tentang dorongan berprestasi. McClel-

land berpendapat bahwa pada dasarnya jika sebuah masyarakat menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka yang perlu diubah adalah dorongan berprestasi individu yang ada dalam masyarakat.

McClelland kemudian melakukan penelitian terhadap dokumen kesusasteraan dari jaman Yunani seperti puisi, drama, pidato, epic dan sebagainya. Karya tersebut dinilai oleh para ahli independen, apakah di dalam karya tersebut terdapat *n-ach* atau dorongan berprestasi atau tidak. Jika karya tersebut mengandung optimisme yang tinggi, keberanian untuk mengubah nasib, tidak cepat menyerah. Jika tidak, maka nilai *n-ach* nya rendah. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi didahului oleh *n-ach* yang tinggi, demikian pula sebaliknya.

McClelland menyimpulkan bahwa *n-ach* merupakan semacam virus yang perlu ditularkan kepada orang-orang dimana masyarakatnya ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu implikasi praktis yang terjadi di Indonesia adalah diadakannya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan *n-ach* ini yaitu dengan *achievement motivation training* (AMT) yang sering diselenggarakan di Indonesia. Sampai saat ini metode pelatihan untuk meningkatkan motivasi berprestasi sering dilakukan dan tentu saja bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

3.1.4. W.W. Rostow: Lima Tahap Pembangunan

Rostow adalah seorang ahli ekonomi. Perhatian terhadap pembangunan yang dilakukan Rostow adalah pengkajian terhadap proses pembangunan, dimana Rostow menjabarkan menjadi Lima Tahap Pembangunan, yaitu: (a) Masyarakat Tradisional; (b) Prakondisi untuk Lepas Landas; (c) Lepas Landas; (d) Bergerak ke Kedewasaan dan (e) Jaman Konsumsi Massal yang Tinggi.

Melalui lima tahap pembangunan itu, maka dapat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat apakah kesemua proses tersebut sudah dijalankan oleh suatu negara. Dan dasar pembedaan lima tahap ini merupakan pembedaan dikotomis antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Rostow menyebutkan bahwa negara yang melindungi kepentingan usahawan untuk melakukan akumulasi modal maka, negara sudah mulai menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini nampak bahwa Rostow sangat terpengaruh teori Harrod-Domar tentang tabungan dan investasi.

3.1.5. Bert F. Hoselitz: Faktor-faktor Non-ekonomi

Hoselitz mengkaji faktor-faktor non-ekonomi yang tidak dikaji oleh Rostow. Faktor tersebut sebagai faktor kondisi lingkungan yang penting dalam proses pembangunan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi sangat penting dalam proses pembangunan, namun faktor kondisi lingkungan seperti perubahan kelembagaan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat mempersiapkan kondisi yang mendukung untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Faktor non ekonomis yang penting antara lain pemasokan tenaga ahli dan terampil. Bahwa salah satu factor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, diperlukan sebuah penyediaan tenaga terampil yang memadai, karena jikadidukung oleh modal dan investasi saja, maka proses pembangunan juga tidak berjalan lancar.

Salah satu hal menarik dari pemikiran Hoselitz ini adalah penekanannya pada aspek kelembagaan yang menopang pembangunan seperti lembaga pendidikan, mobilisasi modal. Dari factor-faktor individual dan budaya, Hoselitz bergerak untuk mengkaji masalah lebih nyata yaitu lembaga politik dan sosial.

3.1.6. Inkeles-Smith: Manusia Modern

Inkeles dan Smith juga mengkaji tentang pentingnya faktor manusia sebagai factor penting dalam penopang pembangunan. Pembangunan bukan sekedar masalah pemasokan modal dan teknologi saja. Aspek manusia penting sekali sebagai pelaksana teknologi atau pelaku utama proses pembangunan yang berlangsung. Maka Inkeles dan Smith kemudian memberikan ciri-ciri manusia modern, antara lain: keterbukaan terhadap terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi pada kehidupan masa sekarang dan kehidupan masa depan, memiliki kesanggupan dalam merencanakan,serta memiliki kepercayaan bahwa manusia bisa menguasai alam.

Berdasarkan kajiannya, Smith-Inkeles menemukan bahwa pendidikan adalah lembaga paling efektif untuk mengubah manusia. Dampak pendidikan dipandang tiga kali lebih efektif dibanding pendekatan yang lain. Jika melihat kondisi Indonesia, salah satu yang krusial untuk dkembangkan adalah pendidikan, jika negara ingin modern dan pertumbuhan ekonomi tinggi, maka perhatian terhadap pendidikan harus besar.

BAB IV

TEORI PERUBAHAN SOSIAL

4.1 Konsep Perubahan Sosial

Perubahan sosial secara teoritik meliputi beberapa hal penting, menyangkut dimensi perubahan sosial serta kondisi dan faktor-faktor perubahan sosial. Perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi dari bentuk-bentuk masyarakat, dan dengan adanya interaksi sosial juga akan menimbulkan proses perubahan masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi tatanan perubahan masyarakat lainnya dalam norma, nilai-nilai, pola-pola perilaku, organisasi sosial, dan lembaga sosial. Perubahan sosial seringkali mengacu kepada perubahan dalam struktur sosial dan hubungan sosial.

Perubahan sosial menurut Soemardjan (2009) merupakan variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik disebabkan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial juga merupakan segala perubahan pada lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok masyarakat, perubahan tersebut tidak hanya bersifat material tetapi imaterial.

Ogburn (Soelaiman, 1998) memandang perubahan teknologi misalnya, dapat menyebabkan perubahan lingkungan material, sehingga menimbulkan perubahan atau terjadi modifikasi kebiasaan-kebiasaan dan kelaziman yang umum dalam masyarakat serta pada lembaga sosial. Dalam kebudayaan, aspek material dan non-material merupakan faktor yang selalu terlibat. Lebih lanjut Ogburn menawarkan suatu konsep analisis kebudayaan dengan konsep "*cultural lag*". Ogburn menjelaskan bahwa kebudayaan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material.

Keduanya mendorong terjadinya perubahan dan saling berpacu dalam proses terjadinya perubahan. Biasanya yang lebih dahulu adalah pada perubahan material, sementara kebudayaan non-material

perubahannya mengiringi kemudian. Perubahan kebudayaan material adalah penyebab perubahan non-material, perubahan non-material lebih lambat dalam penyesuaian bentuknya, atau pertumbuhan tidak selalu sama cepatnya dalam keseluruhannya, akan tetapi ada bagian yang tumbuh cepat dan ada bagian lain yang tumbuh lambat, bagian yang berkembang cepat dan bagian lain yang berkembang lambat tersebut saling berhubungan kebergantungan, keadaan yang demikianlah oleh Ogburn dinamakan dengan "*cultural lag*" (dalam Wallis, 1960). Berbagai macam kebudayaan dan tingkat kecepatan perkembangannya saling berbeda-beda, ada proses yang lebih cepat dan ada yang lambat. Perubahan cepat pada suatu kebudayaan menimbulkan kebutuhan penyesuaian melalui perubahan lain, melalui berbagai macam korelasi hubungan setiap kebudayaan.

Kajian sosiologi yang menjelaskan tentang perubahan sosial berbasis teori evolusi (*evolution theory*), antara lain: (a) Pandangan Comte (1798-1857) tentang "tahap-tahap perkembangan manusia dan masyarakat" yang dikenal dengan hukum tiga tahap perkembangan, yaitu: Tahap teologik (fiktif); Tahap metafisik (abstrak); dan Tahap positif (riil) (Wibisono, 2005; Laeyendecker, 1991). Pandangan Comte inilah yang menjadi acuan para teoritis evolusionis berikutnya (Inkles, 1964; Giddens, 1985); (b) Pandangan Spencer (1820-1903) tentang evolusi masyarakat dari pola sederhana menuju yang limit dan kompleks, dari homogen (*homogeneity*) ke heterogen (*heterogeneity*) (Etzioni, 1973; Rossides, 1978); (c) Marx (1818-1883), tentang evolusi masyarakat menuju masyarakat komunis tanpa kelas dengan pandangan historis materialism; (Rose, 1963; Mutahhari, 1986); (d) Weber (1864-1920), tentang "*the role of ideas in history*".

Bagi Weber setiap individu terdapat potensi rasional untuk meraih tujuan, yang terdiri dari empat macam yaitu: traditional rationality, value oriental rationality, effective rationality, dan purposive rationality atau rationality instrumental. Keempatnya dapat berdiri sendiri, tetapi juga simultan yang secara bersama menjadi acuan perilaku masyarakat, dan tindakan yang paling utama adalah tindakan rationality instrumental (Wrong, 1970; Johnson, 1981; Laeyendecker, 1991); (e) Sorokin (1889-1968), bahwa: Perubahan sosial bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal; Pendekatan historis (*historical approach*) dalam studi perubahan sosial adalah sangat penting; dan Metode logika penuh arti yang terintegrasi dalam budaya (*logico*

meaningful integration of culture) akan menghasilkan tiga sistem sosiokultural (*supersistem*), yaitu: sistem ideasional; sistem inderawi; dan sistem campuran. Sejarah sosiokultural merupakan siklus yang bervariasi antara ketiga supersistem yang mencerminkan kultur "agak" homogen (Green, 1972; Campbell, 1994).

Dimensi perubahan sosial menurut Himes dan Moore yang dikutip Soelaiman, (1998) ada tiga bentuk: dimensi struktural, kultural, dan dimensi interaksional. *Dimensi perubahan struktural* lebih mengacu pada perubahan-perubahan bentuk struktur dalam kehidupan masyarakat, perubahan dalam peranan dalam masyarakat, munculnya suatu peranan-peranan baru, serta perubahan dalam struktur kelas sosial dan perubahan dalam lembaga-lembaga sosial, atau perubahan dapat dijelaskan pula secara lebih praktis perubahan struktural meliputi; bertambah atau berkurangnya kadar peranan, menyangkut aspek perilaku dan kekuasaan, adanya peningkatan atau penurunan jumlah peranan atau pengkategorian peranan, terjadinya pergeseran wadah atau kategori peranan, terjadinya modifikasi saluran komunikasi di antara peranan-peranan atau kategori peranan, terjadinya perubahan dari sejumlah daya guna fungsi sebagai akibat dari struktur.

Adapun dimensi kultural (Soelaiman, 1998) dalam perubahan mengacu pada perubahan-perubahan kebudayaan dalam masyarakat, seperti adanya penemuan (*discovery*), kemajuan berpikir dalam ilmu pengetahuan (*science*), pembaharuan hasil (*invention*) teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan proses peminjaman kebudayaan (*cultural borrowing*). Kesemuanya itu meningkatkan adanya integrasi unsur-unsur baru dalam kebudayaan, bentuk-bentuk lama diganti dengan bentuk-bentuk baru yang secara tidak langsung menimbulkan difusi kebudayaan.

Bentuk umum dan bentuk baru dapat diganti dan dimodifikasi secara terus menerus. Inovasi, difusi, dan integrasi kebudayaan melibatkan proses perubahan sosial dalam dimensi kultural. Inovasi kebudayaan melahirkan penemuan, peniruan, atau peminjaman alat-alat, difusi dikategorikan menjadi dua macam, yaitu penyimpangan kebudayaan dan difusi secara benar, sedangkan integrasi meliputi, penolakan atau penerimaan terhadap bentuk-bentuk baru, duplikasi, cara hidup lama dan baru secara bersama-sama dan terpola, penggantian bentuk-bentuk lama dengan bentuk-bentuk yang baru.

Perubahan sosial menurut dimensi interaksional mengacu kepada perubahan sosial di dalam masyarakat, yang diidentifikasi dalam lima dimensi, yaitu; *pertama*, perubahan dalam frekuensi, seperti; frekuensinya, jumlah atau kontinuitas sampai pada hal-hal yang bertentangan. *Kedua*, perubahan dalam jarak sosial, seperti; hubungan intim, hubungan formal dan informal, dan perubahan dalam arah yang berlawanan. *Ketiga*, perubahan perantara (saluran) seperti; perlakuan partisipan di dalam suatu hubungan mempribadi sebagai tujuan akhir, berubah maknanya menjadi impersonal atau perubahan yang arahnya bertentangan.

Keempat, perubahan dari aturan atau pola-pola, seperti; hubungan antara status yang sama dengan arah yang horisontal menjadi pergaulan status yang tidak sama dan arah hubungannya vertikal atau berubah dalam arah berlawanan. *Kelima*, perubahan dalam bentuk, seperti dari pola hubungan solidaritas, meskipun perangkat struktur lengkap, maka akan terpecah melalui sikap pengalaman yang bermusuhan, atau konflik, atau berubah dalam arah berlawanan (Soelaiman, 1998).

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat terdiri dari dalam dua bentuk, yaitu perubahan dari dalam (internal) dan perubahan dari luar (eksternal). Perubahan dari dalam meliputi aspek demografi (bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk), penemuan-penemuan baru (inovasi), pertentangan atau konflik dan pemberontakan atau revolusi. Faktor demografi yang berhubungan dengan kelahiran dan kematian penduduk, migrasi akan berpengaruh langsung terhadap struktur masyarakat terutama lembaga kemasyarakatan. Pertumbuhan penduduk yang pesat menuntut adanya pengaturan kelembagaan agar terjadi tertib sosial, perpindahan penduduk akibat migrasi akan menyebabkan perubahan sistem kelembagaan sosial dalam bentuk lembaga kemasyarakatan yang baru.

Faktor dari luar (eksternal) yang mendorong terjadinya perubahan masyarakat adalah adanya penetrasi kebudayaan yang masuk dari luar masyarakat yang telah lama tumbuh dan berkembang, sehingga terjadi penyerapan budaya baik melalui interaksi sosial kemasyarakatan, dari pemerintah maupun pengaruh teknologi. Benturan kebudayaan seringkali terjadi jika terdapat dua kebudayaan yang bertemu, dalam prosesnya kemudian muncul peniruan atau imitasi budaya,

misalnya dalam mode, life style, dan lain-lainnya. Faktor lain penyebab terjadinya proses perubahan ialah, terjadinya peperangan dan invasi atau penaklukan dalam suatu daerah kekuasaan, yang terjadi kemudian adalah sang pemenang akan memaksakan kebudayaannya kepada suatu daerah taklukan, misalnya dalam aturan pemerintahan, lembaga sosial kemasyarakatan, tata nilai dan lain-lain.

Dalam prosesnya perubahan sosial dapat diketahui dengan ciri-ciri tertentu (Soekanto, 1994) yaitu; *pertama*, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat akan mengalami perubahan baik secara cepat maupun lambat. *Kedua*, perubahan terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu, dan diikuti oleh perubahan-perubahan pada lembaga sosial lainnya. Karena sifat kelembagaan tadi yang independen, maka sulit untuk mengisolasi perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu, karena keseluruhannya merupakan mata rantai. *Ketiga*, perubahan yang cepat biasanya diikuti dengan disorganisasi yang bersifat sementara, karena berada dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi ini akan diikuti oleh reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai baru. *Keempat*, perubahan tidak dapat dibatasi hanya pada bidang kebendaan atau spiritual saja, karena kedua bidang itu mempunyai kaitan timbal balik.

Perubahan sosial dan kebudayaan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berdasarkan dimensi waktu, dampak dan prosesnya, yaitu: *Pertama*; Dari dimensi waktu dapat dibedakan antara perubahan lambat dan perubahan cepat. Tidak ada ukuran waktu yang baku tentang lambat dan cepatnya perubahan yang terjadi. Sifatnya relatif, artinya perubahan yang satu lebih lambat atau lebih cepat dibandingkan perubahan lainnya. Sebagai contoh, perubahan sosial dan kebudayaan pada masyarakat pedesaan cenderung lebih lambat dibandingkan masyarakat perkotaan. Lazimnya, perubahan yang lambat disebut evolusi, dan perubahan cepat terkait dengan konsep revolusi.

Kedua; Dari dimensi dampak yang ditimbulkan, dibedakan antara perubahan kecil dan perubahan besar. Dikatakan perubahan kecil bila mana tidak menimbulkan dampak perubahan yang mendasar pada berbagai aspek sosial kehidupan masyarakat, misalnya perubahan dalam mode pakaian, sistem kekerabatan (kinship), masuknya budaya minoritas dalam masyarakat. Sebaliknya, perkembangan komunikasi serta industrialisasi cenderung berdampak besar dan signifikan pada

pola kehidupan masyarakat, karena berpengaruh terhadap perubahan kelembagaan/pranata sosial, interaksi sosial, hubungan kerja dan lain-lain.

Ketiga; Dari dimensi proses, dapat dibedakan antara perubahan yang dikehendaki (*intended change*) atau yang direncanakan (*planned change*) dan perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended change*) atau perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned change*). Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan ini memang sengaja direncanakan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan perubahan (*agent of change*) untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebaliknya perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan berlangsung di luar jangkauan pikiran masyarakat dan *agent of change*. Ada kemungkinan kedua bentuk perubahan yang berlawanan ini berlangsung bersama-sama sehingga perubahan yang tidak dikehendaki ini dapat berpengaruh negatif terhadap perubahan yang dikehendaki. Dilihat dari proses dampaknya, seringkali muncul hasil suatu perubahan yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan fenomena seperti ini sulit dihindari. Sebagai contoh pengembangan industrialisasi dapat menimbulkan dampak sampingan berupa pencemaran lingkungan serta perubahan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Inovasi program yang dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat ternyata dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan seperti timbulnya kesenjangan sosial ekonomi antar golongan masyarakat, kecemburuan sosial dan lain sebagainya.

4.2 Teori Fungsional Struktural

Perspektif teori struktural-fungsional yang berkembang pada beberapa dekade terakhir ini, sebenarnya teori ini dipengaruhi dari pengembangan teori oleh sosiolog dan antropolog terdahulu. Tokoh sosiolog diantaranya Comte (1798-1857), Spencer (1820-1903), dan Durkheim (1858-1917). Tokoh antropolog yang banyak menyumbangkan pola pemikirannya untuk bidang atau kajian sosiologi yakni Malinowski (1884-1942) serta Brown (1881-1955) (Paloma, 1984). Proses pendekatan Teori struktural fungsional, memandang bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan

membawa perubahan pula pada bagian yang lain. Asumsi dasarnya bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya (Ritzer, 1992).

Auguste Comte yang mencurahkan perhatiannya pada ketertiban dan keharmonisan masyarakat mengatakan bahwa sosiologi studi tentang statika (struktur) atau strata sosial dan dinamika sosial (proses/fungsi). Dalam membahas struktur masyarakat, Comte menerima premis bahwa masyarakat laksana organisme hidup (Paloma, 1984:23). Perspektif organik Comte, memperlakukan atau mengembangkan hukum-hukum sosial sebagaimana halnya suatu organisme hidup. Studi tentang statika sosial (struktur) dari sosiologi adalah penyelidikan hukum-hukum tindakan dan reaksi yang berbeda dari bagian sistem Sosial.

Dinamika sosial adalah mempelajari gerakan (perubahan) masyarakat. Pernyataan Comte tentang statika sosial (struktur) memberikan inspirasi pada terhadap teori struktural-fungsional. Hal ini dipertegas oleh Veeger (1985), bahwa statika sosial melandasi dan menunjang orde, tertib, dan kestabilan masyarakat. Antara lain sistem perundangan, struktur organisasi, nilai-nilai keyakinan, kaidah dan kewajiban yang kesemuanya memberi bentuk yang kongkrit kepada kehidupan bersama. Spencer melihat bahwa masyarakat sama dengan organisme hidup, mereka sama-sama tumbuh dalam proses evaluasi dengan ciri-ciri khas mereka (Veeger, 1985).

Analisis Spencer tentang perbedaan dan kesamaan antara organisme biologis dan sistem sosial, dengan hati-hati Spencer menegaskan bahwa hanya merupakan sebuah analogi atau model yang tidak seharusnya diterima begitu saja. Hal ini, masyarakat tidak benar-benar mirip dengan organisme hidup, perbedaan di antara keduanya terdapat sebuah perbedaan yang sangat penting. Dalam organisme, mempunyai saling ketergantungan antara bagian-bagian atau saling terkait dalam suatu hubungan yang intim. Sedangkan dalam sistem sosial hubungan yang sangat dekat seperti bagian-bagian organisme tidak begitu jelas terlihat; bagian-bagian yang kadang-kadang sangat terpisah. Makna saling ketergantungan dalam sistem sosial mempunyai arti relatif; banyak variabel-variabel sosial lainnya yang terlibat di dalamnya. Tiap bagian yang tumbuh di dalam tubuh organisme biologis maupun dalam sistem sosial memiliki fungsi dan tujuan tertentu.

Dalam sistem organisme maupun sistem sosial, bila terjadi perubahan pada bagian lain dan pada akhirnya akan terjadi perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Pemikiran Comte dan Spencer tersebut mempertegas asumsi dasar sosiologi, bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain (Paloma, 1984). Lahirnya aliran struktural-fungsional dalam sosiologi memperoleh dorongan yang kuat melalui karya-karya Durkheim. Durkheim memandang masyarakat modern adalah merupakan keseluruhan organis yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggota agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Keadaan normal menunjuk pada keseimbangan (*equilibrium*) atau sebagai suatu sistem yang seimbang.

Bila kebutuhan tertentu tidak dipenuhi maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat "patologis" (ketidakseimbangan atau perubahan sosial) (Paloma, 1984). Sumbangan pemikiran Durkheim terhadap aliran struktural-fungsional cukup besar, dengan menekankan kepada konsep; kesatuan moral dan keseimbangan sistem sosial serta fungsi dari fakta sosial. Sumber utama analisis Durkheim adalah mengenai tipe-tipe yang berbeda dalam solidaritas dan sumber-sumber struktur sosial. Durkheim menggunakan istilah solidaritas mekanik dan organik untuk menganalisa masyarakat keseluruhannya. Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu keadaan kolektif bersama, kepercayaan, sentimen-sentimen bersama, ruang lingkup dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat menekan (*repressive*). Keadaan tersebut terjadi pada masyarakat yang homogen yang merupakan ciri khas solidaritas mekanik. Sedangkan solidaritas organik adalah merupakan hasil evolusi dari solidaritas mekanis. Di dalam solidaritas organik, setiap anggota masyarakat merasakan adanya saling ketergantungan kompleks, saling ketergantungan fungsional, menganut nilai dan norma umum bersama serta ruang lingkup hukum yang bersifat memulihkan (*restitutive*) (Johnson, 1986).

Sumbangan pemikiran aliran struktural fungsional Durkheim tetap dipertahankan dan dikembangkan oleh dua orang antropolog, yaitu Bronislaw Malinowski dan Radcliffe-Brown. Malinowski menggunakan pengertian fungsi untuk pendekatan konsensus. Masyarakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial, unsur-unsur yang saling berhubungan timbul dari kebutuhan dasar setiap manusia. Dasar pemikirannya

dari kebutuhan dasar manusia dan respon budaya yang terintegrasi, berkembang dalam kesatuan fungsi. Radcliffe-Brown memberikan konsep mendasar tentang fungsionalisme dalam ilmu-ilmu sosial.

Menurut Radcliffe-Brown, fungsi dari setiap kegiatan yang selalu berulang, seperti menghukum kejahatan atau dalam proses upacara penguburan, merupakan bagian yang dilakukan dalam kehidupan sosial. Hal ini merupakan sumbangan atau fungsi bagi pemeliharaan kelangsungan struktural (Paloma, 1984). Perspektif struktural-fungsional dalam membahas struktur, Parsons menggunakan konsep sistem (sistem sosial). Sistem ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Sistem sosial ialah struktur atau bagian yang saling berhubungan, atau posisi-posisi yang saling dihubungkan oleh peranan timbal-balik yang diharapkan (Paloma, 1984). Karya Parsons, awalnya dimaksudkan untuk mengembangkan suatu model tindakan sosial yang bersifat voluntaristik yang didasarkan pada sintesanya dari teori Alfred Marshall, Vilfredo Pareto, Emile Durkheim, dan Max Weber (Johnson, 1986:106). Konsepsi sistem yang dipergunakan untuk menganalisa masyarakat sebagai sistem sosial, yang di dalamnya terdapat tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara individu maupun secara kolektif dalam suatu kelompok, lembaga dan masyarakat.

Perspektif fungsional Parsons mengenai sistem sosial didasarkan pada teori tindakan sosial dalam sistem sosial sebagai unit analisis. Konsep masyarakat sebagai sistem sosial digunakan Talcot Parsons dan pengikut-pengikutnya melalui pendekatan struktural-fungsional, memberikan pengertian tentang sistem sosial, ialah proses interaksi diantara pelaku sosial (aktor), sedangkan yang merupakan struktur sistem sosial adalah struktur relasi antara pelaku sebagaimana yang terlibat dalam proses interaksi. Sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu perangkat peran sosial yang berinteraksi atau kelompok sosial yang memiliki nilai, memiliki norma, dan memiliki tujuan yang sama (Garna, 1996).

Keluarga yang merupakan lembaga paling kecil dalam masyarakat mempunyai prinsip-prinsip serupa sebagaimana menurut pandangan aliran struktural-fungsional. Parsons yang mengembangkan pendekatan struktural-fungsional dalam kehidupan keluarga, mengakui adanya keragaman dalam kehidupan sosial. Parsons menjelaskan pula bahwa satuan utama dari sistem sosial terdiri atas kolektivitas dan peranan (Garna, 1996). Martin Roderick (1993) menguraikan, pendekatan

sistem beranjak dari asumsi bahwa suatu masyarakat sedikit banyak saling memiliki ketergantungan dengan dengan lembaga-lembaga sosial berusaha untuk memenuhi fungsi-fungsi yang penting sama menjamin kelangsungan hidup. Selain itu, pendekatan sistem yaitu menganalisa kehidupan masyarakat dari sudut struktur, fungsi, peranan, dan prosesnya.

Sedangkan pendekatan tindakan sosial secara langsung atau tidak melihat lembaga-lembaga sosial sebagai sarana bagi individu untuk tujuan individu maupun tujuan kelompok. Pendekatan tindakan sosial menganalisa masyarakat dari segi pelakunya. Menurut Nasikun (1984), bahwa sistem sosial pada dasarnya tidak lain adalah suatu sistem daripada tindakan-tindakan yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi diantara berbagai individu yang tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggota-anggota dalam masyarakat.

Berbagai standar penilaian umum tersebut adalah norma-norma sosial dan adanya hubungan sosial yang dinamis antara bagian-bagian itu yang sesungguhnya akan membentuk struktur sosial. Max Weber (dalam Jonhson, 1986:), menekankan pada pemahaman subyektif (*verstehen*) sebagai metoda untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti-arti subyektif tindakan sosial. Weber menjelaskan, bahwa tidak hanya mengamati obyek, tetapi juga mengerti menafsirkan tindakan sosial dan melalui tindakan tersebut dapat menjelaskan terjadinya dan dampaknya atau akibat. Prinsip pemahaman subyektif dari Weber ialah menunjuk pada upaya memahami suatu perilaku dengan menjelaskan fenomena tersebut untuk menangkap hubungan di antara perasaan, motivasi, dan pikiran dengan tindakannya.

Perspektif Parsons yang bersifat fungsional itu mengatakan bahwa tindakan individu harus memenuhi persyaratan-persyaratan fungsional. Pada bagian ini, Parsons menekankan pentingnya pemahaman orientasi individu yang bersifat subyektif, termasuk definisi situasi serta kebutuhan dan tujuan individu. Setiap pola perilaku yang sesuai atau menyimpang, setiap kebiasaan atau norma, setiap keputusan kebijaksanaan yang besar dan setiap nilai budaya dapat dianalisa dengan kerangka fungsional (Johnson, 1986).

Weber menggunakan rasionalitas sebagai konsep dasar dalam mengkalisifikasi mengenai tipe-tipe tindakan sosial, dibedakan antara tindakan rasional dan non rasional. Tindakan rasional menurut Weber

meliputi pertimbangan yang sadar dan pilihan yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang digunakan untuk mencapainya. Tindakan diarahkan secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat-sifatnya sendiri, apabila tujuan, serta akibat sekundernya diperhitungkan dan dipertimbangkan secara rasional. Hal ini mencakup pertimbangan rasional atas alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, pertimbangan mengenai hubungan-hubungan tujuan itu dengan hasil-hasil yang mungkin dari penggunaan alat tertentu apa saja, dan akhirnya pertimbangan mengenai pentingnya tujuan-tujuan yang mungkin berbeda secara relatif (Johnson, 1986). Individu atau masyarakat memiliki bermacam-macam tujuan, akan tetapi sangat tergantung pada kondisi atau situasi lingkungan untuk menentukan pilihan dengan pertimbangan yang sadar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan individu selalu menilai alat yang mungkin dapat digunakan, dilakukannya melalui pengumpulan informasi, atau melalui suatu percobaan.

Parsons mengatakan bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh dua macam orientasi, yaitu orientasi motivasional dan orientasi nilai-nilai. Kedua macam orientasi itu sama-sama menunjuk pada pencapaian kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuan, akan tetapi keduanya mempunyai perbedaan di mana orientasi motivasional lebih bersifat individual dan orientasi nilai lebih bersifat sosial. Orientasi motivasional menunjuk pada keinginan individu yang bertindak demi memperbesar kepuasan dan mengurangi kekecewaan. Orientasi nilai menunjuk pada standar-standar normatif yang mengendalikan pilihan individu (alat dan tujuan) dan prioritas sehubungan dengan adanya kebutuhan dan tujuan-tujuan yang berbeda. Hal ini mengandung pengertian bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh kehendak pribadinya dan sekaligus dikontrol nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Johnson, 1986).

Ada tiga tahap refleksi teoritik Parsons, yaitu: (a) tahap *pertama*; ketika dia menyusui teori Tindakan Voluntaristik tahun 1949; (b) tahap *kedua*; ketika dia meninggalkan teori tindakan ke Teori Sistem tahun 1951; dan (c) tahap *ketiga*; tahap terakhir ketika dia menerangkan teori fungsional struktural pada evolusi masyarakat tahun 1966 (Bierstedt, 1974, Priyono, 2002). Hal yang penting dalam memahami teori fungsional struktural Parsons, yaitu: (a) skema AGIL; (b) Konsep sistem; serta (c) adalah konsep fungsional struktural.

Pertama; Skema AGIL. Menurut Parsons empat hal yang berfungsi dan sangat penting yang diperlukan dalam menganalisis semua sistem "tindakan" manusia untuk pemeliharaan pola di masyarakat, yaitu Adaptation (A), Goal attainment (G), Integration (I), dan Latensi (L) (Bachtiar, 2006). Keempat fungsi yang saling berhubungan Adaptation (adaptasi). Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian Organisme perilaku, merupakan suatu sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi (menyesuaikan dan mengubah lingkungan eksternal). Sedangkan bidang atau sistem ekonomi merupakan subsistem yang melaksanakan fungsi masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui: tenaga kerja, produksi, dan alokasi;

Goal attainment (Pencapaian tujuan). Merupakan sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan. Kemudian Sistem kepribadian adalah melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sedangkan sistem pemerintahan (sistem politik) melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mengejar tujuan kemasyarakatan dan memobilisasi aktor sumber daya manusia untuk mencapai tujuan.

Integration (Integrasi), merupakan sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian dalam sistem, sistem juga harus mengelola hubungan ketiga fungsi lainnya (A,G,L). Kemudian sistem sosial adalah menanggulangi fungsi integrasi dengan jalan mengendalikan bagian-bagian dalam sistem. Sedangkan komunitas (sistem hukum, aturan) akan menjalankan suatu fungsi integrasi, mengkoordinasi beragam komponen masyarakat;

Latency (pemeliharaan pola). Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individu atau pola kultural untuk bertindak. Kemudian sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang mendorong individu bertindak. Sedangkan sistem *fiduciari* (contoh lembaga keluarga, sekolah, agama) menangani fungsi pemeliharaan pola dengan menyebarkan nilai, norma pada aktor (individu) untuk diinternalisasikan pada dirinya. Keempat unsur dalam skema AGIL tersebut saling kait-mengkait (Johnson, 1981; Ritzer dan Goodman, 2004)

Kedua; konsep sistem, untuk memahami skema tersebut, beberapa pemikiran kunci dari Parsons tentang fungsional struktural dapat dipahami dalam konsep-konsep sebagai berikut: (a) sistem kultural, merupakan kekuatan utama yang mengikat berbagai sistem tindakan. Kultur mengatur interaksi antar aktor, menginteraksikan kepribadian dan menyatukan sistem sosial. Kultur, dipandang sebagai sistem simbol yang terpola, teratur yang menjadi sasaran orientasi para aktor, aspek-aspek kepribadian yang sudah terinternalisasi dan pola-pola yang sudah terlembagakan di dalam sistem sosial. Jadi, kultur akan menjadi faktor eksternal untuk menekan pola tindakan aktor. (Ritzer, 2004); (b) sistem sosial, yaitu terdiri dari sejumlah aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang mempunyai aspek lingkungan (fisik), aktor mempunyai suatu motivasi untuk "mengoptimalkan kepuasan", yang berhubungan dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam sistem simbol yang terstruktur secara kultural.

Konsep kunci sistem sosial menurut Parsons adalah: aktor; interaksi; lingkungan; optimalisasi; kepuasan dan kultur. Parsons menggunakan status peran sebagai unit dasar dari sistem sosial. Status adalah menyangkut posisi struktural individu dalam sistem sosial, sedangkan peran adalah apa yang harus dilakukan individu dalam posisinya. Aktor dalam pandangan Parsons, bukan dilihat dari sudut pikiran, ide, keyakinan dan tindakan sehari-hari (seperti dalam teori berparadigma definisi sosial), tetapi dilihat sebagai kumpulan beberapa status dan peran yang terpola oleh struktur dalam sistem. Jadi, individu terdeterminasi oleh faktor eksternal.

Inti pemikiran Parsons tergambar dalam empat sistem tindakan, yaitu: sistem kultural; sistem sosial; sistem kepribadian; dan organisme perilaku, yang keempatnya terkait dengan AGIL (Abraham, 1982). *Ketiga*; Dalam Konsep fungsional struktural, Parsons mengemukakan beberapa asumsi sebagai berikut: (a) sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung; (b) sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan; (c) sistem bergerak dalam proses perubahan yang teratur; (d) sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain; (e) sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya; (f) alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem; (g) sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri meliputi pemeliharaan batas serta pemeliharaan

hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam (Ritzer dan Goodman, 2004).

Menurut pandangan Parsons, bahwa: (a) antara aktor dan struktur sosial mempunyai hubungan erat; (b) persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses internalisasi dan sosialisasi; (c) dalam proses sosialisasi, nilai dan norma diinternalisasikan (norma dan nilai menjadi bagian dari "kesadaran" aktor), sehingga aktor mengabdikan pada kepentingan sistem sebagai suatu kesatuan; (d) Aktor biasanya menjadi penerima pasif dalam proses sosialisasi; (e) dalam fungsional struktural Parsons, adalah bagaimana cara sistem mengontrol aktor, bukan mempelajari bagaimana cara aktor menciptakan dan memelihara sistem (Ritzer dan Goodman, 2004).

Substansi pokok teori fungsional struktural Parsons tentang perubahan sosial adalah: (a) proses perubahan yang terjadi akan mengarah pada keseimbangan (*equilibrium*) dalam sistem sosial, apabila ada konflik internal, perlu dicari upaya-upaya untuk tetap terjaga keseimbangan dalam sistem; (b) proses diferensiasi struktural akan menimbulkan perubahan baru di dalam subsistem, tetapi tidak mengubah struktur sistem sosial secara keseluruhan. Nilai-nilai pokok dianggap tetap tidak berubah; (c) perubahan evolusi masyarakat adalah mengarah kepada "peningkatan kemampuan adaptasi", menuju keseimbangan hidup; dan (d) apabila terjadi perubahan dalam struktural, maka akan terjadi perubahan dalam kultur normatif sistem sosial bersangkutan (perubahan sistem nilai-nilai terpenting). Hal ini akan mempengaruhi perubahan unit-unit lain dalam sistem (Lauer, 1978; Harper, 1989; Johnson and Hunt, 1984).

Berdasarkan pra survai tentang realitas sosial kehidupan masyarakat petani pada lokasi penelitian yakni di desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu Kecamatan Tolangohula, nampak ada kesesuaian apabila peneliti menganalisis fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula dengan menggunakan teori fungsional struktural Parsons sebagai orientasi teoretik. Letak kesesuaiannya menurut peneliti antara lain. Pada dasarnya tindakan petani menerima ganti rugi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu dapat dianalisis dari skema fungsional AGIL, yaitu Adaptation (A), Goal attainment (G), Integration (I), dan Latensi (L). AGIL berfungsi untuk pemeliharaan pola di masyarakat.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu tidak bisa terlepas dari sistem kultural yang berkembang saat itu, baik di keluarga atau masyarakat. Kultur dalam keluarga atau masyarakat akan mengatur (*mendeterminasi*) proses alih fungsi lahan pertanian untuk lahan perkebunan tebu. Tindakan masyarakat petani sangat berkaitan dengan unsur-unsur struktur sosial pada masyarakat desa, yaitu: lembaga sosial; kekuasaan; interaksi sosial; nilai dan norma-norma sosial. Keterkaitan hubungan tersebut sangat erat atau merupakan suatu kesatuan sistem, hal ini sesuai dengan pandangan teori fungsional struktural. Bentuk perubahan sosial yang terjadi pada level kehidupan masyarakat petani sebagai akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu adalah berlangsung secara evolusi dan perubahan evolusi keluarga petani tersebut mengarah kepada "peningkatan kemampuan adaptasi". Kemampuan adaptasi yang dimaksudkan adalah petani ketika tidak memiliki lahan pertanian sebagai sumber kehidupan dan sumber pendapatannya, mereka berupaya bekerja di luar sektor pertanian guna menuju pada keseimbangan dalam dinamika kehidupan masyarakat dan hal ini sesuai dengan pandangan teori fungsional struktural.

4.3 Teori Konflik

Teori konflik adalah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. (Raho, 2007). Pada dasarnya pandangan teori konflik tentang masyarakat sebetulnya tidak banyak berbeda dari pandangan teori struktural fungsional, karena keduanya sama-sama melihat bahwa masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian. Perbedaan antara keduanya terletak dalam asumsi mereka yang berbeda tentang elemen-elemen pembentuk masyarakat itu.

Banyak definisi konflik yang dikemukakan para pakar. Dari berbagai definisi dan berbagai sumber yang ada istilah konflik dapat dirangkum sebagai berikut: (1) konflik adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai, serta kebutuhan; (2) hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu maupun

kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran tertentu, namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan; (3) pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, dan motifasi pelaku atau yang terlibat di dalamnya; (4) suatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat orang lain perasaan serta fisiknya terganggu; (5) bentuk pertentangan yang bersifat fungsional karena pertentangan semacam itu mendukung tujuan kelompok dan memperbarui tampilan, namun disfungsional karena menghilangkan tampilan kelompok yang sudah ada; (6) proses mendapatkan monopoli ganjaran, kekuasaan, pemilikan, dengan menyingkirkan atau melemahkan pesaing; (7) suatu bentuk perlawanan yang melibatkan dua pihak secara antagonis; (8) kekacauan rangsangan kontradiktif dalam diri individu (Liliweri, 2005). Adapun perbedaan mendasar tentang teori fungsionalisme dan teori konflik pada tabel berikut ini:

Perbedaan (Antitesis)

Antara Teori Fungsionalisme dan Teori Konflik

Teori Fungsionalisme	Teori Konflik
Masyarakat cenderung statis, dan proses perubahan menuju pada keseimbangan	Masyarakat pada setiap saat tunduk pada perubahan
Menekankan pada suatu keteraturan masyarakat	Menekankan pada pertikaian dan konflik dalam masyarakat
Setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga kestabilan	Setiap elemen dalam masyarakat berpotensi menyumbang terjadinya disintegrasi dan perubahan
Masyarakat diikat oleh nilai, norma dan moral	Keteraturan dalam masyarakat karena adanya pemaksaan dari golongan yang lebih berkuasa
Memusatkan perhatian pada kohesi sosial yang diciptakan oleh nilai kebersamaan dalam masyarakat	Menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Sumber: Ritzer dan Goodman (2004), Kanto (2006)

Menurut Dahrendorf (Kanto, 2006) teori sosiologi dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori konsensus dan teori konflik. Teoritis konsensus cenderung mengkaji nilai integrasi dalam masyarakat, sedangkan teoritis konflik lebih memusatkan perhatian

kepada kepentingan dan penggunaan kekerasan. Dalam masyarakat pasri dijumpai konsensus dan konflik, yaitu pada prinsipnya dapat memiliki hubungan timbal balik. Tidak akan ada konflik tanpa di dahului dengan konsensus oleh konsensus sebelumnya, sebaliknya, konflik bisa menimbulkan konsensus dan integrasi sosial. Perumusan teori konflik sangat dipengaruhi oleh fungsional struktural. Konsep kuncinya adalah perbedaan otoritas dan kepentingan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Otoritas yang melekat pada posisi individu atau kelompok adalah unsur utama dalam analisis konflik. Otoritas membedakan antara kelompok-kelompok superordinal (berkuasa) dan subordinasi (yang dikuasai). Bila teori ini dikaitkan dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik, terlihat bahwa antara superordinal (berkuasa) dalam hal ini kepala desa memaksa masyarakat menjual tanah milik masyarakat petani (subordinal) kepada perusahaan menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula. Selanjutnya pengaruh teori konflik dalam studi sosiologi berada dalam rentang waktu yang sangat panjang (1318 sampai awal tahun 1960-an).

Para tokoh teori konflik antara lain; (a) Marx dan Park, yang dikenal dengan pendekatan "Sistemik Konvensional" (Revolusionis); (b) Pareto dan Veblen, yang dikenal dengan "Tipe Naturalistik Konvensional Teori Konflik" (Revolusionis); (c) Dahrendorf dan Mills, yang dikenal penganut pendekatan maupun aliran "Sistemik Modern" (Revolusionis); dan (d) Coser dan Reisman, yang dikenal penganut model "Naturalistik Modern" (fungsionalis-evolusionis) (Kinloch, 2005). Banyak teoritis konflik yang masuk dalam kelompok Neo-Marxis, antara lain; (a) Lukacs, sumbangan besar Lukacs terhadap teori Marxian adalah berupa gagasan tentang "Reifikasi dan Kesadaran Kelas"; (b) Gramsci, dia tetap mengakui faktor ekonomi sebagai penyebab konflik dan revolusi, tetapi ada juga faktor lain yaitu massa perlu mengembangkan "ideologi revolusioner", dan dalam membangkitkan ideologi revolusioner, massa harus ada "tokoh intelektual".

Baik Lukacs dan Gramsci sama-sama memusatkan perhatian pada aspek "Gagasan Kolektif dari pada aspek "Struktur Ekonomi" seperti yang dikemukakan oleh Marx; (c) Lefebvre, dia mengatakan bahwa teori Marxian perlu menggeser fokusnya dari "cara-cara produksi ke produksi ruang" (dari produksi ke reproduksi). Ruang berfungsi dengan berbagai macam cara untuk mereproduksi sistem

kapitalis, struktur kelas di dalam sistem ekonomi. Menurut Lefebvre, setiap aksi evolusioner harus berhubungan dengan "restrukturisasi ruang" (Ritzer dan Goodman, 2004); (d) Menurut Coser; Konflik meningkatkan penyesuaian sosial; Konflik bermula dari tuntutan rasio penghargaan; Struktur sosial bisa berbentuk tertutup dan terbuka; Tipe-tipe masalah menyangkut pengaruh konflik dan konflik akan menjadi fungsional bagi sistem sosial (Coser and Rosenberg, 1969); dan (e) Reisman, dia menjelaskan relevansi "perubahan demografi" sebagai fundasi dari proses konflik sosial.

Dalam posisi penelitian ini, teori Neo Marxian yang dipilih sebagai *theoretical orientation* adalah teori konflik Coser yang oleh sebagian ahli dianggap sebagai 'teori konflik modern yang bersifat "aturalistik dan Evolusioner". Hal ini bukan berarti hanya teori Neo Marxian Coser saja yang cocok untuk dijadikan orientasi teori dalam suatu kajian fenomena sosial. Berikut beberapa substansi pokok pikiran atau asumsi teori konflik Coser, antara lain; *Pertama*; Konflik akan cenderung meningkatkan dari pada menurunkan penyesuaian sosial adaptasi dan memelihara bahas kelompok; Konflik bersifat fungsional dan tidak fungsional. Konflik muncul ketika ada akses dari penuntut untuk memperoleh imbalan sesuai dengan kerjanya; Struktur sosial berbeda-beda bentuknya. Ada yang berbentuk mobilitas sosial, eksistensi institusi katup keselamatan (*safety-valve institutions*), konflik institusional, dan toleransi, yang pada tingkatan tertentu memiliki hubungan erat, tingkat berpartisipasi kelompok, dan panjangnya konflik. Jadi, semakin erat sistem stratifikasi, semakin sedikit pulalah institusi katup keselamatan; Semakin rendah institusionalisasi toleran konflik institusional, semakin lebih dekat merajut kelompok, partisipasi kelompok dan apabila perjuangan dalam kelompok lebih lama, lebih intens akan berpotensi menjadi konflik sosial.

Kedua; Konflik yang realistis dalam sebuah struktur sosial yang terbuka memberikan kontribusi penyesuaian struktur yang lebih hebat, fleksibilitas dan integritas sosial. Sebaliknya konflik yang tidak realistis dalam lingkungan yang fleksibel dan tertutup akan menimbulkan kekerasan dan disintegrasi. Pada dasarnya perspektif fungsional struktural dan perspektif konflik adalah "saling kait mengkait" dalam memahami masyarakat secara holistik tentang proses sosial. Baik teori fungsional maupun teori konflik, adalah sama-sama teori parsial dalam melakukan analisis fenomena sosial.

Kehidupan sosial memang memerlukan keserasian fungsi (teori fungsional), tetapi untuk melakukan proses perubahan dan dinamika hidup, maka kehidupan sosial memerlukan adanya konflik antar unsur sosial atau sub sistem (teori konflik), sehingga konflik dan konsensus (fungsional), perpecahan dan integrasi adalah proses fundamental (sesuatu yang mesti ada) dalam masyarakat, meski porsinya beragam antar kelompok. Atau konflik dan integrasi merupakan bagian integral dalam sistem sosial (Coser and Rosenberg, 1969; Cambel, 1981); Fungsi konflik adalah: (a) konflik antar kelompok dalam memperkuat solidaritas ingroup, atau bisa juga menciptakan kohesi melalui aliansi dengan kelompok lain; (b) konflik dapat mengaktifkan peran individu, yang semula terisolasi menjadi tidak terisolasi, semula pasif menjadi aktif; (c) konflik juga membantu fungsi komunikasi (artinya fungsi, peran dan batas-batas musuh dengan konflik semakin jelas), fungsi konflik yang lebih positif, tetapi konflik juga mempunyai disfungsi (Ritzer dan Goodman, 2004).

Menurut Kinloch (2005), ada beberapa konsep penting dari pandangan Coser dalam menganalisis tentang konflik dan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, antara lain: (a) terdapat hubungan yang erat antara struktur sosial masyarakat dengan konflik dan kekuasaan; (b) bahwa bentuk perubahan sosial lebih bersifat evolusi daripada revolusi; (c) bahwa konflik yang mempunyai suatu fungsi tentang kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan lingkungan hidupnya (makna fungsional konflik); dan (d) kerangka konflik yang terjadi tidak semata-mata berbasis ekonomi (seperti pandangan Marx), tetapi juga berbasis pada pandangan non ekonomi.

Berdasarkan observasi tentang kehidupan petani di sekitar pabrik di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo misalnya, bahwa penggunaan teori Neo-Marxis yang dikemukakan oleh Coser sebagai orientasi teori dalam penelitian ini adalah proporsional, dengan alasan sebagai berikut: (1) Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo (situs penelitian) berlangsung dalam bentuk evolusi (bukan revolusi). Hal ini sesuai dengan analisis Coser tentang proses perubahan sosial di masyarakat bersifat makroskopik; organik-naturalis; evolusioner dan struktural (Kinloch, 2005). (2) Penyebab konflik masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula terutama yang bermukim di sekitar lokasi perkebunan tebu tidak hanya semata-mata di pengaruhi oleh

kepentingan ekonomi (pandangan Marx), tetapi juga didorong oleh "kondisi struktur sosial masyarakat" (Coser and Rosenberg, 1969) yang oleh sebagian masyarakat dianggap kurang berpihak untuk mendukung kepentingan masyarakat petani, misalnya pada saat pembelian lahan pertanian atau ganti rugi lahan tahun 1989 (era orde baru) pengaruh kekuasaan elit lokal atau struktur politik lokal begitu kuat "mengkooptasi" para petani desa yang rata-rata tingkat pendidikannya sangat rendah, sehingga petani tidak dapat melakukan penolakan.

Berdasarkan pra survai, fenomena struktur sosial di lokasi penelitian, menunjukkan bahwa: (a) pengaruh elit sosial di pedesaan, misalnya tokoh masyarakat atau aparat desa ikut berperan dalam proses-proses sosial masyarakat desa; (b) pada proses awal terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu untuk kepentingan perusahaan pabrik gula, pengaruh elit politik desa (aparat pemerintah desa) dan para "makelar" tanah, relatif besar peranannya dalam proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu; (3) meskipun pola komunikasi dan pengambilan suatu keputusan di desa terjadi atau secara musyawarah dan mufakat, namun pola dan nuansa musyawarahnya terasa adanya "penekanan" dari pihak eksternal (misalnya makelar dan aparat desa). Ketika pemerintah Orde Baru tumbang dan lahirnya era reformasi, rasa ketidakpuasan warga desa muncul dalam bentuk protes demo, baik langsung ditujukan kepada pengelola perusahaan serta kepada Kepala Desa terutama desa-desa yang memiliki lahan yang luas untuk kepentingan pertanian dan telah beralih menjadi lahan perkebunan tebu. Menurut Coser adalah, dalam melakukan analisis sosial perlu melakukan "analisis hubungan antara struktur sosial yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat dan model konflik serta kekuasaan".

Konflik sosial yang terjadi pada masyarakat petani (situs penelitian) bisa bersifat "fungsional" dan disisi lain "tidak fungsional" (disfungsi) bagi kehidupan masyarakat pedesaan. Konflik muncul ketika warga desa merasa ada akses untuk menuntut memperoleh imbalan pada perusahaan pabrik gula sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada saat alih fungsi lahan. Fungsi konflik antara petani dengan perusahaan pabrik gula adalah: (1) konflik yang terjadi di desa dapat memperkokoh solidaritas *ingroup* (para petani desa); (2) konflik yang terjadi di desa ternyata dapat mengaktifkan peran individu, terutama tokoh-tokoh tua dan muda, yang semula tidak nampak berperan ke-

mudian muncul untuk menggalang persatuan; (3) konflik yang terjadi dapat meningkatkan fungsi komunikasi antar status dan peran warga desa.

Fungsi konflik yang lebih positif (fungsional), tetapi konflik di desa juga dapat mengakibatkan "disfungsi", yaitu pada era reformasi terjadi demo penurunan secara paksa para kepala desa atau elit kekuasaan di desa serta orang-orang yang dahulu "mendukung" alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan tebu, disamping itu tidak menutup kemungkinan alih fungsi lahan menyebabkan konflik dalam keluarga karena berebut warisan, sehingga hubungan keluarga bersifat disintegratif.

Berdasarkan uraian di atas bukan berarti pandangan Neo-Marxian Coser adalah "paling cocok" untuk dijadikan sebagai theoretical orientation dalam kajian alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan tebu, sebab menurut peneliti masih ada teori-teori neo-Marxian lain yang bisa digunakan. Jadi, pemilihan teori Neo-Marxian Coser ini semata-mata atas pertimbangan kemampuan peneliti dalam memahami teori konflik Neo-Marxian, disamping itu juga didasarkan pada pertimbangan untuk membatasi ruang lingkup kajian.

4.3 Teori Tindakan Rasional Weber

Teori tindakan rasional Weber, sangat berbeda dengan teori tindakan sosial Parsons. Perbedaan yang mendasar, antara lain: (a) orientasi filosofis teori Parsons adalah positivisme, sedangkan Weber adalah idealisme-Historisisme; (b) tindakan sosial individu menurut Parsons adalah ditentukan oleh struktur sosial yang telah baku atau faktor eksternal mendeterminasi individu, sedangkan tindakan sosial rasional Weber adalah, bahwa individu bebas memilih, semua tindakan ditentukan faktor internal (jiwa, pikiran) manusia itu sendiri bukan lingkungan (Denzin, 1978; Johnson, 1981).

Berikut ini beberapa substansi pokok pikiran Weber dalam memahami fenomena perubahan sosial antara lain: *Pertama*; Weber melihat pola dan bentuk perubahan sosial sama seperti para teoritis fungsional struktural, yaitu perubahan sosial dalam bentuk evolusi, tetapi paradigma yang dianut Weber bukan paradigma fakta sosial (positivistis) tetapi paradigma definisi sosial (interpretatif) (Ritzer, 2001; Giddens, 1987).

Oleh karena itu pandangan Weber terhadap makna motivasi dan arti subyektif dalam melakukan proses analisis sosial adalah sangat

penting. *Kedua*; Weber memilih konsep rasionalitas sebagai titik pusat perhatian utamanya. Konsep rasionalitas bagi Weber adalah sama pentingnya dengan konsep "solidaritas" bagi Durkheim. Tindakan manusia terbagi menjadi dua, yaitu tindakan tidak rasional dan tindakan rasional. Tindakan rasional inilah yang membawa ke arah perubahan sosial secara kualitatif-akumulatif (Wrong, 1970; Johnson, 1981).

Ketiga; Bagi Weber, kenyataan sosial (social reality) secara mendasar terdiri dari individu-individu dan tindakan-tindakan sosialnya. Jadi, makna 'tindakan sosial' bagi Weber adalah "apabila semua individu dalam bertindak itu memberikan arti subyektif kepada tindakan itu". Karena arti subyektif tadi dihubungkan dengan individu yang bertindak dan memperhitungkan reaksi tindakan orang lain serta diarahkan, pada suatu tujuan tertentu (Wrong, 1970; Ritzer, 2001). Jadi, kenyataan sosial menurut Weber adalah sesuatu yang didasarkan pada motivasi dan tindakan sosial tersebut.

Keempat; Dunia sosial-budaya tidak dipandang sebagai sesuatu yang sesuai dengan hukum-hukum ilmu alam saja dan manusia terdeterminasi oleh norma sosial dan struktur sosial (seperti pandangan kaum positivis), tetapi dunia sosial-budaya bagi Weber dilihat sebagai suatu dunia kebebasan dan terkait dengan pemahaman internal (rasionalitas) individu dimana arti-arti subyektif itu ditangkap (Wrong, 1970; Laeyendecker, 1991). *Kelima*; Bagi Weber pemikiran yang menekankan pada Verstehen (pemahaman subyektif mendalam) sebagai metode untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti-arti subyektif tindakan sosial adalah sangat penting. Setiap peneliti sosial harus menganalisis perilaku aktual manusia individual menurut orientasi subyektif mereka sendiri (Campbell, 1981).

Keenam; Weber menilai bahwa "Konsep Rasionalitas" merupakan kunci bagi suatu analisis obyektif mengenai arti-arti subyektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda. "Analisis obyektif mengenai arti subyektif", sering dipahami secara salah. Menurut Weber, "tindakan obyektif" adalah pengalaman subyektif yang dapat dimengerti orang lain atau kelompok masyarakat yang lain, karena dialami bersama secara meluas, sedangkan "tindakan subyektif" adalah pengalaman subyektif yang tidak dapat dikomunikasikan atau dimengerti oleh kehidupan bersama, meskipun hal itu sangat riil dalam setiap pelaksanaan upacara tradisi.

Ketujuh; Menurut Weber, hal yang penting perlu diperhatikan dalam memahami tindakan sosial individu adalah: (1) dalam tindakan sosial tersebut di atas, bisa terjadi tindakan satu mengkait pada tindakan yang lain, misalnya tindakan tradisional mengkait tindakan rasional yang berorientasi nilai; (2) pola perilaku khusus yang dilakukan beberapa individu, bisa berbeda karena orientasi, motivasi, dan tujuan subyektif dan individu yang berbeda; dan (3) tindakan sosial dapat dimengerti hanya menurut arti subyektif (*verstehen*) dan pola-pola motivasional individu (Wrong, 1970; Giddens, 1985).

Kedelapan; Perubahan secara evolusi lebih berbentuk rasional dalam tindakan sosial (aksi sosial). Hal ini berakar dari proses persaingan yang menghasilkan seleksi atas individu yang berkualitas. Weber memandang rasionalitas sebagai hasil dari berbagai tipe birokrasi (struktur dalam tindakan sosial yang didefinisikan dengan teliti oleh peranan sistem aturan, norma dan sanksi). Oleh karena itu proses evolusi masyarakat dalam hal ini dapat dikontrol, dikendalikan dan bersifat impersonal (birokratik) dalam merespon kebutuhan efisiensi ekonomi dengan industrialisasi. Jadi, ada dua tipologi utama pandangan Weber, yaitu tipe tindakan sosial dan model birokrasinya (Rossides, 1978; Kinloch, 2005). *Kesembilan;* struktur sosial dalam pandangan Weber adalah didefinisikan dalam istilah-istilah yang bersifat probabilistik dan bukan sebagai suatu kenyataan empirik atau realitas berlangsung dan terlepas dari individu (seperti pemahaman kaum positivis).

4.4. Teori Pilihan Rasional Coleman.

Meski dipengaruhi perkembangan teori pertukaran, teori pilihan rasional umumnya berada di pinggiran aliran utama teori sosiologi (Hechter dan Kanazawa, 1997). Melalui upaya Coleman, teori ini menjadi salah satu teori hebat dalam sosiologi masa kini (Chriss, 1995; Lindenberg, 2000; Tilly, 1997). Dikatakan demikian karena tahun 1989 Coleman mendirikan jurnal *Rationality and Society* yang bertujuan menyebarkan pemikiran yang berasal dari perspektif pilihan rasional. Selain dari itu, Coleman (1990) menerbitkan buku yang sangat berpengaruh, *Foundations of Social Theory* berdasarkan perspektif pilihan rasional itu.

Sebelum memahami teori pilihan rasional, maka perlu memahami komtentar pendahuluan Coleman (1989) atas edisi pertama jurnal *Rationality and Society*. Jurnal itu bersifat interdisipliner karena teori pi-

lian rasional (Coleman menyebutnya "*paradigma tindakan rasional*") (1989) adalah satu-satunya teori yang mungkin dapat menghasilkan proses integrasi berbagai paradigma sosiologi. Coleman dengan keyakinannya menyatakan bahwa pendekatannya beroperasi mulai dari dasar metodologi individualisme dan dengan menggunakan teori pilihan rasional sebagai landasan tingkat mikro untuk menjelaskan fenomena tingkat makro.

Karya yang secara metodologis adalah holistik, mengambang di tingkat sistem tanpa bersumber pada aktor yang bertindak menciptakan sistem itu. Pandangan tentang tindakan sebagai murni ungkapan perasaan belaka, tak rasional, dan sepenuhnya disebabkan oleh kekuatan dari luar tanpa diantarai maksud atau tujuan aktor. Ia mengesampingkan karya empiris yang umumnya dikerjakan dalam ilmu sosial yang memandang perilaku individu "dijelaskan" oleh determinan atau faktor tertentu tanpa model tindakan apa pun (Coleman, 1989).

Menurut Coleman sosiologi seharusnya memusatkan kepada sistem sosial. Tetapi, fenomena makro itu harus dijelaskan oleh faktor internalnya sendiri, khususnya oleh faktor individual. Alasan *Pertama*; Coleman lebih menyukai bekerja di tingkat individual ini karena berbagai alasan, termasuk kenyataan bahwa data biasanya dikumpulkan pada tingkat individual dan kemudian disusun untuk menghasilkan data pada tingkat sistem sosial. Sedangkan alasan *kedua*; perhatian di tingkat individual biasanya adalah karena "intervensi" dilakukan untuk menciptakan perubahan sosial.

Inti perspektif Coleman adalah gagasan bahwa teori sosial tak hanya merupakan latihan akademis, tetapi harus dapat memengaruhi kehidupan sosial melalui "intervensi" tersebut. Dengan memusatkan perhatian pada individu ini, Coleman mengatakan bahwa ia adalah individualis secara metodologis, meski ia melihat perspektif khusus, sebagai varian khusus dari orientasi individual itu. Pandangannya adalah khusus dalam arti bahwa ia menerima gagasan yang muncul dan masih memusatkan perhatian pada faktor internal sistem sosial, faktor internal itu tak mesti selalu orientasi dan tindakan individual. Artinya, fenomena tingkat mikro selain yang bersifat individual pun dapat menjadi sasaran perhatian analisisnya.

Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa "tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau

pilihan (preferensi) Tetapi Coleman selanjutnya menyatakan bahwa secara teoritis memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yakni aktor dan sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan interaksi antara aktor dan sumber daya secara rinci menuju ke tingkat sistem sosial: Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak yang lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan dalam sistem tindakan. Selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan suatu perwujudan kepentingannya yang memberikan ciri saling tergantung terhadap suatu tindakan mereka. (Coleman, 1990).

Pemusatan perhatiannya pada tindakan rasional individu ini dilanjutkannya dengan memusatkan perhatian pada masalah hubungan mikro-makro atau bagaimana cara gabungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem. Meski Coleman memprioritaskan masalah ini, Coleman juga memperhatikan hubungan makro ke mikro atau bagaimana cara sistem memaksa orientasi aktor. akhirnya ia memusatkan perhatian pada aspek hubungan mikro-mikro atau dampak tindakan individual terhadap tindakan individu lain. Dengan menggunakan suatu pendekatan pilihan rasionalnya, Coleman menerangkan serentetan fenomena tingkat makro. Dasar pendirian adalah bahwa teoritis perlu memelihara gambaran mereka mengenai aktor terus-menerus dan gambaran fenomena mikro ini muncul berbagai kesan mengenai fenomena tingkat makro. Dengan cara ini, perbedaan dalam fenomena makro dapat dirunut dari perbedaan struktur hubungan di tingkat makro dan bukan pada perbedaan tingkat mikro.

Satu langkah kunci gerakan dari mikro ke makro itu adalah mengakui wewenang dan hak yang dimiliki oleh seorang individu terhadap individu lain. Tindakan ini cenderung menyebabkan subordinasi seorang aktor terhadap aktor lain. Lebih penting lagi, pengakuan ini menciptakan fenomena makro paling mendasar, yakni satu unit tindakan yang terdiri dari dua orang, ketimbang dua orang aktor yang

bebas. Akibatnya, struktur berfungsi terbebas dari aktor, dibandingkan dengan memaksimalkan ketertarikannya, dalam kasus ini, seorang aktor malah berusaha merealisasikan ketertarikan aktor yang lain atau unit kolektif independen. Ini bukan saja merupakan realita perbedaan sosial, tetapi juga merupakan salah satu yang memiliki defisiensi. (Coleman, 1990). Menimbang orientasi aplikasinya Coleman menunjukkan ketertarikan dalam diagnosa dan solusi dari berbagai permasalahan.

Coleman melihat tindakan rasional ini dalam beberapa komponen masing-masing: Perilaku kolektif. Salah satu contoh pendekatan Coleman dalam menganalisis fenomena makro adalah kasus perilaku kolektif (Zablocki, 1996). Ia menjelaskan perilaku kolektif karena cirinya yang sering tak stabil dan kacau itu sukar dianalisis berdasarkan perspektif pilihan rasional. Namun, menurut pandangan Coleman, teori pilihan rasional dapat menjelaskan semua jenis fenomena makro, tak hanya yang teratur dan stabil saja. Apa yang menyebabkan perpindahan dari aktor rasional ke berfungsinya sistem yang disebut "perilaku kolektif yang liar dan bergolak adalah pemindahan sederhana dan pengendalian atas tindakan seorang aktor ke aktor lain, yang dilakukan secara sepihak, bukan sebagai bagian dari pertukaran" (Coleman, 1990).

Mengapa secara sepihak orang memindahkan segala kontrol atas tindakannya kepada orang lain? Jawabannya, menurut teori pilihan rasional, bahwa mereka berbuat demikian dalam upaya memaksimalkan berbagai kepentingan mereka. Biasanya upaya memaksimalkan sesuatu kepentingan individual itu menyebabkan keseimbangan kontrol antara beberapa aktor, dan ini menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat. Tetapi dalam kasus perilaku kolektif, karena terjadi pemindahan kontrol secara sepihak, upaya memaksimalkan kepentingan individu-individu tidak selamanya menyebabkan keseimbangan sistem norma. Fenomena tingkat makro lain yang menjadi sasaran penelitian adalah norma. Meski kebanyakan sosiolog menganggap norma dapat digunakan untuk menerangkan perilaku individu, namun mereka tak menerangkan mengapa dan bagaimana cara norma itu terwujud.

Coleman ingin mengetahui bagaimana cara norma muncul dan dipertahankan dalam sekelompok aktor yang rasional. Menurutnya norma diprakarsai dan dipertahankan oleh beberapa orang yang melihat keuntungan yang dihasilkan dari pengamalan terhadap norma

dan kerugian yang berasal dari pelanggaran norma itu. Orang ingin melepaskan pengendalian terhadap perilaku mereka sendiri, tetapi dalam proses, mereka memperoleh pengendalian (melalui norma) terhadap perilaku orang lain. Coleman meringkas pendapatnya tentang norma yakni: Unsur sentral penjelasan ini adalah melepaskan sebagian hak untuk mengendalikan tindakan diri sendiri seseorang dan menerima sebagian hak untuk mengendalikan tindakan orang lain dan itulah yang memunculkan norma. Hasil akhirnya adalah bahwa pengendalian yang dipertahankan setiap orang sendirian akan terdistribusikan secara luas ke seluruh kumpulan aktor yang melaksanakan kontrol itu (Coleman, 1990).

Coleman mengakui bahwa norma saling berkaitan, tetapi masalah makro, hal seperti itu berada di luar cakupan karyanya tentang landasan sistem sosial. Di sisi lain ia ingin membahas masalah mikro mengenai internalisasi norma. Ia mengakui, dalam membahas internalisasi norma ia memasuki "perairan yang berbahaya bagi teori yang berlandaskan pilihan rasional" (1990). Coleman melihat internalisasi norma memaparkan sistem sanksi internal; aktor memberikan sanksi terhadap dirinya sendiri bila ia melanggar norma. Coleman melihat bahwa pemikiran seorang aktor atau sekumpulan aktor berupaya keras untuk mengendalikan aktor lain dengan mengingatkan norma yang diinternalisasikan ke dalam diri mereka. Jadi, sekumpulan aktor berkepentingan untuk menyuruh dan mengatur aktor lain menginternalisasikan norma dan mengendalikan mereka. Ia merasa bahwa rasional "karena upaya seperti itu dapat efektif yang masuk akal" (1990).

Coleman melihat norma dari sudut tiga unsur utama teorinya dari mikro-makro, tindakan bertujuan di tingkat mikro dan dari makro ke mikro. Norma adalah fenomena tingkat makro yang ada berdasarkan tindakan bertujuan di tingkat mikro. Begitu muncul, norma, melalui sanksi atau ancaman sanksi, mempengaruhi tindakan individu. Tindakan tertentu mungkin membesarkan hati sedangkan tindakan lain mengecilkan hati. Aktor Korporat. Dengan kasus norma ini Coleman beralih ke tingkat makro dan melanjutkan analisisnya di tingkat makro dalam membahas aktor kolektif (Clark, 1996).

Di dalam kolektivitas seperti itu, aktor tak boleh bertindak menurut kepentingan pribadi mereka, tetapi harus bertindak menurut kepentingan kolektivitas. Ada bermacam-macam aturan dan mekanisme untuk beralih dari pilihan individual ke pilihan kolektif

(sosial). Aturan yang paling sederhana adalah dalam kasus pemungutan suara dan prosedur untuk menabulasikan suara pemilih individu dan memajukan keputusan kolektif. Inilah dimensi dari mikro ke makro, sedangkan sesuatu seperti daftar calon-calon yang diusulkan oleh kolektivitas menyangkut hubungan dari makro ke mikro.

Coleman menyatakan, baik aktor kolektif maupun aktor individual mempunyai tujuan. Dalam struktur kolektif, seperti sebuah organisasi, aktor individual dapat mengejar tujuan pribadi mereka masing-masing yang mungkin berbeda dari tujuan kolektif. Konflik kepentingan ini membantu kita memahami sumber pemberontakan terhadap otoritas perusahaan. Hubungan dari mikro ke makro di sini meliputi berbagai cara di mana orang melepaskan otoritas dari struktur kolektif dan memberikan legitimasi kepada orang yang terlibat dalam pemberontakan. Tetapi, juga ada hubungan dari makro ke mikro dalam kondisi tingkat makro tertentu yang menyebabkan orang bertindak seperti melepas dan menanam modal.

Sebagai teoritis pilihan rasional, Coleman bertolak dari individu dan gagasan bahwa semua hak dan sumber daya ada di tingkat individual ini. Kepentingan individu menentukan jalannya peristiwa. Tetapi ini tidak benar terutama dalam masyarakat modern di mana bagian terbesar hak dan sumber daya dan karena itu kedaulatan terletak di tangan aktor kolektif (Cole 1990). Dalam kehidupan modern aktor kolektif mengambil peran yang penting. Aktor kolektif dapat bertindak demi keuntungan atau kerugian individu. Bagaimana cara kita menilai aktor kolektif dalam hal ini? Coleman berpendapat "bertolak secara konseptual dari titik di mana semua kedaulatan terletak di tangan manusia individual terbuka peluang untuk melihat seberapa baiknya kepentingan utama mereka disadari oleh sistem sosial yang ada. Dalil yang menyatakan bahwa manusia individu berdaulat telah membukakan bagi ilmu sosiolog untuk menilai pelaksanaan fungsi sistem sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat" (1990).

Menurut Coleman, perubahan sosial terpenting adalah munculnya korporat, sebagai pelengkap aktor "pribadi natural". Keduanya dapat dianggap sebagai aktor karena keduanya mempunyai "pengendalian terhadap sumber daya dan peristiwa, kepentingan terhadap sumber daya dan peristiwa, dan mempunyai kemampuan mengambil tindakan untuk mencapai kepentingan mereka melalui pengendalian itu" (1990). Memang selalu ada aktor korporat, tetapi aktor kolektif

lama, seperti keluarga, terus-menerus digantikan oleh yang baru, aktor kolektif yang sengaja dibentuk.

Menurut Coleman, ini dapat dilakukan dengan mengadakan reformasi internal atau dengan mengubah struktur eksternal seperti peraturan hukum yang memengaruhi aktor kolektif itu atau agen yang dapat mengaturnya. Coleman membedakan antara struktur primordial berdasarkan kekeluargaan, seperti pertentangan serta kelompok keagamaan, dan struktur yang berdasarkan tujuan tertentu, seperti organisasi ekonomi dan pemerintahan. Ia melihat kemajuan dalam "kebebasan" aktivitas yang pernah terikat bersama dalam keluarga.

Struktur primordial terlepas karena fungsinya diambil alih oleh sederetan aktor kolektif. Coleman (1990) sangat menaruh perhatian kepada kebebasan tersebut sebagaimana perhatiannya kepada fakta bahwa saat ini kita dipaksa untuk berhadapan dengan posisi dalam struktur purposif dari pada berhadapan dengan mereka yang mendiami struktur primordial. Karena itu kemudian, dia menyimpulkan bahwa tujuan dari kerjanya ini adalah "menyediakan pondasi untuk membangun struktur masyarakat yang luwes sebagai struktur primordial yang menghilangkan unsur "orang" di dalamnya".

Coleman (1990) mengemukakan kebanyakan teori sosial yang menyetujui pandangan yang ia sebut *homo sociologicus*. Perspektif ini memusatkan perhatian pada proses sosialisasi dan keserasian antara individu dan masyarakat. Karena itu *homo sociologicus* tak mampu menjelaskan kebebasan individu untuk bertindak seperti yang mereka inginkan walaupun paksaan dikenakan terhadap mereka. Lagi pula perspektif ini terbatas kemampuannya untuk mengevaluasi tindakan sistem sosial. Sebaliknya, *homo economicus*, menurut Coleman, memiliki semua kemampuan ini. Coleman menyerang teori sosial tradisional karena tak relevan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan tak mampu membantu kita mengetahui ke mana arah perubahan masyarakat. Teori sosiologi (maupun riset sosiologi). Teori sosial dan ilmu sosial umumnya dibutuhkan untuk membangun masyarakat baru (Coleman, 1993, Bulmer, 1996). Tujuannya bukanlah untuk menghancurkan struktur purposif, tetapi lebih untuk mendapatkan peluang dan menyingkirkan masalah struktur purposif itu. Masyarakat baru memerlukan ilmu sosial baru pula. Kaitan antara bidang institusional yang telah berubah dan ilmu sosial tentu akan dapat melintasi batas-batas ilmu tradisional.

Berdasarkan beberapa pokok pikiran teori Max Weber dan Coleman tentang tindakan rasional individu dapat disimpulkan bahwa pemakaian teori Weber dan Coleman sebagai *theoretical orientation* dalam memahami pandangan (perspektif mikro) masyarakat petani yang tanah pertaniannya terjadi alih fungsi menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula adalah kurang proporsional, dengan alasan sebagai berikut: *Pertama*; Pola tindakan petani dalam menerima ganti rugi lahan dari pihak perusahaan tidak lepas dari pertimbangan keterpaksaan individual, yang bersifat obyektif maupun subyektif. Tindakan petani menerima ganti rugi lahan pertanian dari pihak perusahaan juga didasarkan pada suatu pertimbangan rational instrumental, yaitu, (1) berdasarkan tujuan tertentu yang hendak dicapai; (2) ada skala prioritas atau kriteria-kriteria dalam mencapai tujuan; (3) sebelum melakukan tindakan dipikirkan aspek positif atau negatif yang akan muncul dari tindakan tersebut; dan (4) kemampuan meramalkan atau memprediksi ke depan dari tindakan tersebut. Kualitas kemampuan individu (kepala keluarga) dalam merumuskan berbagai tujuan sampai dengan memprediksi bagaimana dampak dalam menerima ganti rugi lahan pertaniannya.

Kedua; Memahami pola pandangan dan tujuan yang melekat dalam pikiran masyarakat petani yang tanah pertaniannya terjadi alih fungsi menjadi lahan perkebunan tebu akan diperoleh hasil secara maksimal apabila menggunakan suatu metode verstehen (memahami subyek/individu secara mendalam), melalui penelitian Kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara takterstruktur dan observasi partisipatif.

Ketiga; Memahami pola tindakan kepala keluarga petani yang tanah pertaniannya terjadi alih fungsi menjadi lahan perkebunan tebu, tidak cukup dilihat dari satu macam tindakan tetapi bisa terkait pada tindakan yang lain, misalnya tindakan tradisional mengkait tindakan rasional yang berorientasi nilai; Pola perilaku khusus yang dilakukan beberapa kepala keluarga yang mengalami alih fungsi lahan untuk perumahan bisa berbeda-beda karena perbedaan pandangan subyektif dari masing-masing individu; dan tindakan para kepala keluarga tersebut hanya dapat dimengerti menurut arti subyektif (verstehen) dan pola pandangan dan motivasional individu atau perorangan (Ros-sides, 1978; Giddens, 1985).

BAB V

TEORI DEPENDENSI

5.1 Asumsi Dasar Teori Dependensi

Secara historis, teori Dependensi lahir atas ketidakmampuan teori Modernisasi membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Secara teoritik, teori Modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara Dunia Ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itulah kemudian negara Dunia Ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan.

Paradigma inilah yang kemudian dibantah oleh teori Dependensi. Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh faktor internal di negara tersebut, namun lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dari luar negara Dunia Ketiga itu. Faktor luar yang paling menentukan keterbelakangan negara Dunia Ketiga adalah adanya campur tangan dan dominasi negara maju pada laju pembangunan di negara Dunia Ketiga. Dengan campur tangan tersebut, maka pembangunan di negara Dunia Ketiga tidak berjalan dan berguna untuk menghilangkan keterbelakangan yang sedang terjadi, namun semakin membawa kesengsaraan dan keterbelakangan. Keterbelakangan jilid dua di negara Dunia Ketiga ini disebabkan oleh ketergantungan yang diciptakan oleh campur tangan negara maju kepada negara Dunia Ketiga. Jika pembangunan ingin berhasil, maka ketergantungan ini harus diputus dan biarkan negara Dunia Ketiga melakukan roda pembangunannya secara mandiri.

Salah satu pemikir utama yang sampai saat ini masih mendapatkan tempat dalam gugusan ilmu pengetahuan terkemuka adalah Karl Marx. Ketertarikan banyak orang akan pemikiran Marx terutama dalam masalah ekonomi dan kelas sosial menyebabkan pemikirannya relatif diminati dan dilestarikan. Kelompok intelektual yang merujuk-pendapatnya kepada Marx disebut dengan kaum Marxis. Ada dua

hal utama dalam masalah pembangunan yang menjadi karakter kaum Marxis Klasik. *Pertama*, negara pinggiran yang pra-kapitalis adalah kelompok negara yang tidak dinamis dengan cara produksi Asia, tidak feodal dan dinamis seperti tempat lahirnya kapitalisme, yaitu Eropa. *Kedua*, negara pinggiran akan maju ketika telah disentuh oleh negara pusat yang membawa kapitalisme ke negara pinggiran tersebut. Ibaratnya, negara pinggiran adalah seorang putri cantik yang sedang tertidur, ia akan bangun dan mengembangkan potensi kecantikannya setelah disentuh oleh pangeran tampan. Pangeran itulah yang disebut dengan negara pusat dengan ketampanan yang dimilikinya, yaitu kapitalisme. Pendapat inilah yang kemudian dibantah oleh teori Dependensi.

Bantahan teori Dependensi atas pendapat kaum Marxis Klasik ini juga ada dua hal. *Pertama*, negara pinggiran yang pra-kapitalis memiliki dinamika tersendiri yang berbeda dengan dinamika negara kapitalis. Bila tidak mendapat sentuhan dari negara kapitalis yang telah maju, mereka akan bergerak dengan sendirinya mencapai kemajuan yang diinginkannya. *Kedua*, justru karena dominasi, sentuhan dan campur tangan negara maju terhadap negara Dunia Ketiga, maka negara pra-kapitalis menjadi tidak pernah maju karena tergantung kepada negara maju tersebut. Ketergantungan tersebut ada dalam format "neo-kolonialisme" yang diterapkan oleh negara maju kepada negara Dunia Ketiga tanpa harus menghapuskan kedaulatan negara Dunia Ketiga.

Teori Dependensi juga lahir atas respon ilmiah terhadap pendapat kaum Marxis Klasik tentang pembangunan yang dijalankan di negara maju dan berkembang. Aliran neo-marxisme yang kemudian menopang keberadaan teori Dependensi ini. Tentang imperialisme, kaum Marxis Klasik melihatnya dari sudut pandang negara maju yang melakukannya sebagai bagian dari upaya manifestasi Kapitalisme Dewasa, sedangkan kalangan Neo-Marxis melihatnya dari sudut pandang negara pinggiran yang terkena akibat penjajahan.

Dalam dua tahapan revolusi, Marxis Klasik berpendapat bahwa revolusi borjuis harus lebih dahulu dilakukan baru kemudian revolusi proletar. Sedangkan Neo-Marxis berpendapat bahwa kalangan borjuis di negara terbelakang pada dasarnya adalah alat atau kepanjangan tangan dari imperialis di negara maju. Maka revolusi yang mereka lakukan tidak akan membawa perubahan di negara pinggiran, ter-

lebih lagi, revolusi tersebut tidak akan mampu membebaskan kalangan proletar di negara berkembang dari eksploitasi kekuatan alat-alat produksi kelompok borjuis di negara tersebut dan kaum borjuis di negara maju.

Marxis Klasik percaya bahwa jika terjadi revolusi sosialis, maka hal itu sebaiknya dilakukan oleh kelompok proletar industri yang ada di kota-kota tempat berlangsungnya industrialisasi. Sedangkan Neo-Marxis berpendapat bahwa revolusi sosial sebenarnya kekuatan potensialnya terletak pada para petani di pedesaan dan rakyat yang ada di pinggiran perkotaan.

Tokoh utama dari teori Dependensi adalah Theotonio Dos Santos dan Andre Gunder Frank. Theotonio Dos Santos sendiri mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidak imbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut. Dia menjelaskan bahwa kemajuan negara Dunia Ketiga hanyalah akibat dari ekspansi ekonomi negara maju dengan kapitalismenya. Jika terjadi sesuatu negatif di negara maju, maka negara berkembang akan mendapat dampak negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif terjadi di negara berkembang, maka belum tentu negara maju akan menerima dampak tersebut. Sebuah hubungan yang tidak imbang. Artinya, positif-negatif dampak pembangunan di negara maju akan dapat membawa dampak pada negara berkembang. Dalam perkembangannya, teori Dependensi terbagi dua, yaitu Dependensi Klasik yang diwakili oleh Andre Gunder Frank dan Theotonio Dos Santos, dan Dependensi Baru yang diwakili oleh E.H. Cardoso.

5.2 Pembangunan Menurut Theotonio Dos Santos

Ketergantungan adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara tertentu dipengaruhi oleh ekspansi dari ekonomi negara lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Dos Santos dalam mengkritisi pendapat kaum Marxis Klasik yang berpendapat bahwa kapitalisasi negara maju akan dapat membawa kemajuan pada negara-negara sedang berkembang.

Hubungan yang terjalin antara negara maju dan negara terbela-kang adalah hubungan yang tidak sehat karena negara maju melakukan eksploitasi sumberdaya pada negara berkembang untuk kepentingan pembangunan di negaranya sendiri. Eksploitasi sumberdaya tersebut dilakukan melalui simpul-simpul industri yang ada di negara berkembang namun atas investasi negara maju, sehingga keuntungan yang

didapatkan oleh industri tersebut banyak yang ditarik ke negara maju, sedangkan beban dampak industrialisasi dilimpahkan ke negara berkembang yang menjadi tempat industrialisasi.

Keterbelakangan ekonomi negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh tindakan terintegrasinya mereka ke dalam tata ekonomi kapitalisme di negara maju. Namun disebabkan karena tindakan pengawasan ketat dan monopoli modal asing, serta penggunaan teknologi maju pada tingkat internasional dan nasional. Pada gilirannya hal tersebut menjadikan negara Dunia Ketiga mereproduksi keterbelakangan, kesengsaraan, dan marginalisasi sosial dalam batas wilayahnya sendiri. Semakin tergantung satu negara Dunia Ketiga dengan negara maju, maka kondisi tersebut akan semakin berpotensi membawa keterbelakangan dan kesengsaraan pada negara Dunia Ketiga.

5.3 Pembangunan Menurut Andre Gunder Frank

Bagi Frank, teori Modernisasi memiliki kekurangan karena ia hanya memberikan penjelasan tentang faktor internal sebagai penyebab utama dari keterbelakangan di negara Dunia Ketiga. Teori Modernisasi mengesampingkan faktor eksternal yang juga tidak kalah penting dalam memberikan andil keterbelakangan di negara Dunia Ketiga. Frank menyangkal bahwa tradisionalisme dan feodalisme yang selama ini dituding sebagai akar penyebab gagalnya pembangunan di negara Dunia Ketiga.

Teori Modernisasi juga mengesampingkan konteks sejarah lahir dan berkembangnya negara Dunia Ketiga dengan sepenuhnya menggunakan sejarah negara Eropa sebagai ukuran historis dari pembangunan. Negara Barat dan negara Dunia Ketiga memiliki sejarah lahir dan berkembang yang berbeda. Negara Barat tidak pernah merasakan kolonialisasi sebagaimana yang terjadi di negara Dunia Ketiga. Perbedaan ini membawa dampak yang berbeda pada pembangunan yang dilakukan pada dua jenis negara tersebut.

Penjajahan dalam bentuk apapun telah merubah struktur politik-ekonomi di negara Dunia Ketiga karena mereka menjadi negara yang pernah dijajah oleh negara maju. Perubahan struktur politik-ekonomi inilah yang menuntut arah alternatif pembangunan yang sama sekali berbeda dengan pembangunan yang dilakukan di negara maju yang pernah menjajah negara Dunia Ketiga. Perubahan arah pembangunan ini menurut Frank sangat penting dilakukan karena sebenarnya keter-

belakangan bukan sesuatu yang alami, melainkan seperti barang ciptaan dari panjangnya sejarah kolonial di negara-negara Dunia Ketiga.

Secara agak radikal, Frank yang pernah bekerja di *Economic Commission in Latin America* menyebutkan bahwa dalam bentuk apapun juga, kapitalisme telah menyebabkan keterbelakangan di negara Dunia Ketiga, terutama secara politis. Dibawah pengaruh pendapat Presbich, Frank secara tegas menyatakan bahwa keterbelakangan di negara berkembang adalah karena dampak pembangunan yang terjadi di negara maju.

Salah satu bukti dari pendapat ini adalah dengan melihat pembentukan kota atau negara satelit oleh negara maju di kawasan Dunia Ketiga. Kota atau negara satelit ini pada masa kolonial berfungsi sebagai wilayah yang memfasilitasi proses pengambilan surplus ekonomi dari negara satelit ke negara maju. Kota-kota ini dipimpin atau diawasi oleh petugas yang memiliki otoritas penuh dari negara maju, sehingga mampu melakukan determinasi kebijakan yang sangat luas kepada birokrat di negara Dunia Ketiga.

5.4 Krisis Pembangunan di Indonesia

Masalah yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada pertengahan tahun 1998, yang pertama dipicu dari krisis ekonomi kemudian berkembang menjadi berbagai krisis lainnya, sehingga akhirnya sampai pada krisis kepercayaan. Fenomena ini memuat dua dimensi permasalahan: secara internal orang tidak lagi percaya kepada berbagai bentuk penguasaan atas diri dan masyarakatnya, dan secara eksternal orang tidak percaya lagi kepada masyarakat Indonesia. Demikian merosotnya harga diri bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini sendiri bertanya: siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana masyarakat Indonesia ini?

Clyde Kluckhohn (1961) membuat suatu kerangka orientasi sistem nilai budaya, yaitu sebagai konsep yang menerangkan dasar-dasar sistem nilai budaya tentang masalah pokok dari kehidupan manusia yang sifatnya universal. Secara umum Kluckhohn menggambarkan bahwa dari masalah dasar sistem nilai budaya itu sekurangnya mencirikan tiga bentuk masyarakat, (1) masyarakat tradisional, (2) masyarakat transisional, dan (3) masyarakat modern.

Pada masa sebelum terjadinya berbagai krisis yang menimpa masyarakat Indonesia, tidak sedikit orang Indonesia yang menyatakan bahwa secara umum masyarakatnya telah modern, hal ini terlihat dengan banyaknya intelektual dikalangan masyarakat yang menyatakan

bahwa pendidikan tinggi bukan lagi barang asing untuk masyarakat Indonesia, sarana dan prasarana yang memadai untuk kehidupan orang modern, juga tingkat hidup yang mencirikan orang modern (Inkeles, dalam : Weiner, 1976).

Namun pandangan itu ternyata sirna begitu saja pada saat era reformasi digaungkan, dalam banyak hal ternyata orang Indonesia bagaikan orang 'primitif' yang sedang mencari bentuk; dalam kenyataannya, bentuk masyarakat Indonesia belum sampai pada bentuk yang modern, mungkin masih transisional, bahkan mungkin masing tradisional. Pada bentuk hakekat tentang *karya* misalnya, orientasi nilai budayanya cenderung menganggap bahwa karya itu untuk mencapai suatu kedudukan, kehormatan, atau jabatan tertentu saja; bahkan ada kecenderungan bahwa karya itu hanya sekedar untuk mencari nafkah hidup saja, kenyataan mana tidak saja berlaku pada lapisan bawah atau menengah masyarakat, tetapi juga lapisan atas.

Kecenderungan orientasi tentang karya ini ternyata paralel dengan persepsi manusia tentang waktu, hanya sebagian kecil manusia Indonesia dan hanya sebagian aspek kehidupan saja yang berorientasi ke masa yang akan datang; menyimpan padi di lubang (*leuit* : komunitas Baduy) adalah perwujudan dari orientasi manusia ke masa yang akan datang, namun tidak menunjukkan orientasi yang bersifat menyeluruh dari aspek kehidupannya. Jabatan atau kedudukan tertentu dalam masyarakat sifatnya tidak kekal, maka untuk menjaga kehidupan setelah lepas masa jabatannya, orang dengan segala upaya berusaha mengumpulkan segala sesuatu selagi masih berkuasa atau menjabat tanpa menghiraukan nilai-nilai, kaidah dan norma yang berlaku

Individulisme dalam pengertian manusia modern berarti adanya penilaian yang tinggi dari masyarakat terhadap berbagai usaha diri sendiri sehingga menuntun manusia untuk mandiri, bukan dalam arti hidup sendiri tanpa menghiraukan keberadaan manusia lain. Faham ini kurang berkembang pada masyarakat Indonesia yang lebih menilai tingginya kebersamaan, gotong royong (orientasi *kolateral*) dan ketergantungannya kepada figur atasan atau senior (orientasi *vertikal*). Dengan nilai-nilai luhurnya, manusia Indonesia seolah-olah digiring untuk tidak saling bersaing satu sama lain, bahkan mentabukan pertentangan dan lebih menilai tinggi nilai keharmonisan; bentuk mana kalau dilihat dari sudut perubahan dan perkembangan masyarakat sangatlah tidak menguntungkan

BAB VI

TEORI PEMBANGUNAN KONTEMPORER

6.1 Teori Sistem Dunia

Secara historis, program-program modernisasi pada tahun 1960-an di negara-negara Dunia Ketiga banyak mengalami kegagalan, sehingga mendorong munculnya teori Dependensi dengan aliran madzhab neo-Marxis yang mendasarinya. Teori Dependensi ini kemudian melakukan kritikan terhadap teori Modernisasi dan menuduhnya sebagai bentuk rasionalisasi dari imperialisme. Perdebatan antara dua kelompok teori ini menghangat pada tahun 1970-an. Pada saat inilah Immanuel Wallerstein menilai bahwa tata ekonomi kapitalis dunia tidak dapat dijelaskan hanya oleh dua perspektif teori yang telah mapan tersebut. Dalam hal ini Wallerstein mengajukan beberapa fakta yaitu:

1. Negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hongkong, Malaysia dan Singapura telah mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa melakukan teori Modernisasi sebagaimana yang dipropagandakan oleh AS. Mereka juga tidak mengalami ketergantungan sebagaimana diusulkan oleh teori Dependensi. Ini merupakan tantangan serius bagi kekuatan ekonomi AS.
2. Adanya krisis di berbagai negara sosialis yang diawali dengan perpecahan di Republik Rakyat Cina dan runtuhnya Uni Soviet.
3. Fenomena krisis di Amerika Serikat akibat keterlibatannya dalam perang-perang di beberapa negara Dunia Ketiga, krisis Watergate, embargo minyak tahun 1975, inflasi dan stagnasi ekonomi Amerika Serikat akhir tahun 1970-an, adalah merupakan tanda mulai robohnya hegemoni ekonomi Amerika Serikat atas negara Dunia Ketiga.

Tiga hal pokok tersebut menjadi latar belakang historis kemunculan teori world empire yang diusulkan oleh Immanuel Wallerstein. Dengan menggunakan kerangka pemikiran neo-Marxis, ia dan beberapa sosiologi lainnya melakukan kajian terhadap pembangunan di negara

Dunia Ketiga dengan perpektif yang berbeda dengan teori Modernisasi dan Dependensi.

Asumsi dasar dari teori ini menyatakan bahwa dunia awalnya dikuasai oleh kekuatan lokal dengan sistemnya masing-masing, lalu kekuatan ini saling menjalin hubungan walaupun terpisahkan lokalitasnya. Kemudian terjadi penggabungan sistem baik oleh penaklukan. Sebuah Kerajaan Dunia (*World Empire*) kemudian muncul dan mengendalikan sistem ekonomi-politik dari sistem-sistem negara dibawahnya, walaupun tidak secara yuridis. *World Empire* inilah yang sekarang mengendalikan negara-negara di dunia. Dengan tinjauan teoritik tersebut, muncul tiga klasifikasi negara dan fungsi ekonominya antara satu dengan lainnya, tiga klasifikasi tersebut adalah: (1) *Negara Pusat*, mengambil keuntungan dari: (2) *Negara Pusat-Pinggiran*, mengambil keuntungan dari: (3) *Negara Pinggiran*, pihak yang paling dieksploitir.

Wallerstein tidak sepakat dengan pendekatan Dependensi yang melihat bahwa dalam ketergantungan yang terjadi, hanya ada dua jenis negara yaitu negara pusat dan negara pinggiran. Dalam kata lain ada negara metro dan ada juga negara satelit. Ketidaksepakatan ini berangkat dari anggapan bahwa dunia, negara dan pembangunan yang sedang dan akan terjadi ini tidak begitu kompleks. Tidak sesederhana seperti yang dijelaskan oleh teori Dependensi dengan penggolongan tersebut. Untuk itulah kemudian ia mengusulkan adanya tiga klasifikasi negara yang kini sedang muncul di dunia.

Lebih lanjut, tiap negara dilihat dalam bingkai sistem dunia secara utuh dan tidak dapat berdiri sendiri. Tiap negara dalam kasta tersebut naik status menuju negara dengan tingkat kemakmuran lebih baik. Menurut Immanuel Wallerstein, ada tiga strategi bagi sebuah negara untuk dapat menaikkan kastanya dalam konsep *world empire*, yaitu:

- 1) Berani merebut kesempatan untuk berspekulasi melakukan industrialisasi substitusi barang impor oleh negara pinggiran. Ketika hal ini berani dilakukan oleh negara pinggiran, maka ia akan dapat menyiapkan ancang-ancang untuk tidak tergantung oleh negara pusat dalam hal pasokan barang-barang baku industri di dalam negerinya sendiri;
- 2) Menarik investasi perusahaan luar negeri untuk mendirikan perusahaan multinasional dan menggandeng pengusaha lokal. Dalam hal ini, peran negara menjadi sangat vital karena institusi

yang bernama negara yang mampu melakukan koordinasi dan memberikan perlindungan terhadap usaha kecil domestik yang pada umumnya memiliki modal, tenaga ahli dan wilayah pemasaran produksi terbatas. Jenis industri domestik dalam skala internasional jelas memerlukan dana yang tidak sedikit karena ia akan bersaing dengan produk unggulan negara-negara maju yang sudah memiliki pangsa pasar jelas dengan kualitas yang telah teruji. Yang dapat mengawal hal ini adalah negara yang menjadi institusi politik tertinggi dalam sebuah kawasan;

- 3) Negara menjalankan kebijakan internal untuk memandirikan perekonomian negaranya sendiri dan terbebas dari dominasi negara pusat. Salah satu kebijakan internal tersebut dapat berupa politik dumping atau proteksi atas produk-produk industri dalam negeri yang membanjiri pasar dalam negeri. Proteksi ini juga menuntut perlindungan dari sisi kebijakan ekonomi yang merupakan otoritas pemerintah negara pinggiran dan pasokan modal yang juga harus diperbantukan untuk mampu meningkatkan industri tersebut menjadi usaha yang lebih besar dan mampu bersaing dengan industri luar negeri lainnya. Selain itu, pemerintahan negara pinggiran juga harus mulai menyiapkan tenaga ahli dalam negeri untuk pada saatnya nanti mereka dapat mengembangkan teknologi industri domestik. Dengan peningkatan penguasaan teknologi industri domestik, maka produk industri dalam negeri akan dapat bersaing ditengah pasar global yang sedang berjalan. Dengan survive-nya industri domestik, maka pendapatan nasional sebuah negara akan berpotensi mengalami surplus pertumbuhan ekonomi. Surplus pertumbuhan ekonomi dapat membawa kesejahteraan dan kemakmur



- Alvin Y. So, Suwarsono, 1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. LP3ES, Jakarta.
- Amin, Samir, dalam Magnus Blomstrom & Bjorn Hettne, *Development Theory in Transition, The Dependency Debat and Beyond: Third World Responses*, (London: Zed Books, 1984)
- Bodenheimer, 1970. Dependency and Impperialism: The Roots Of Latin American Underdevelopment. North American Congress in Latin America (NACLA) Newsletter.
- Beilharz Peter, 2005. *Teori-Teori Sosial. Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Blomstrom, Magnus & Bjorn Hettne, *Development Theory in Transition, The Dependency Debat and Beyond: Third World Responses*, (London: Zed Books, 1984)
- Budiman Arief, 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PR.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cardoso, FH. 1982. *Dependency and Development in Latin America in Introduction to The Sociology of Developing Countries*. Monthly Review Express. New York.
- Etzioni, halcvi, Eva dan Amitai Etzioni, (ed.). 1973, *Social Change: Sources, Patterns, and Consequence*, Edisi Kedua. New York. Basic, Book.
- Frank, AG. 1969. *The Development of Underdevelopment in Latin America; Underdevelopment or Revolution*. Monthly Review Express. New York. 1984. *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*. Pustaka Pulsar. Jakarta.
- Galtung, J. 1980. *A Structural Theory of Imperialism in Dialectics of third World Development*. Montclair. New York.
- Hoogvelt Ankie, 1995. *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*. Penyadur. Alimudin. Grafiing Persada. Jakarta.
- Kanto Sanggar, 2006. *Modernisasi dan Perubahan Sosial. Suatu Kajian Dari Perspektif Teori dan Empirik*. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Malang.

- Koentjaraningrat, 1994. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia Persada Utama, Jakarta.
- Lauer, Robert, 1993, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Alimanda SU, Rineka Cipta, Jakarta
- Light, Donald, Suzane Keller dan Craig Calhoun, 1989. *Sociology*, Edisi Kelima Alfred A. Knopf. New York.
- Lirner, Daniel, 1983., *Memudarnya Masyarakat Tradisional* (terjemahan Muljarto Tjokroaminoto) Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Musthopa Chabib, 2007, *Studi Pembangunan*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, Surabaya
- Roxbourgh, I. 1986. *Teori-Teori Keterbelakangan*. LP3ES. Jakarta.
- Santos, TD. 1970. *The Structure of Dependence*. American Economic Review, Volume 60, Nomor 2
- Ritzer, George, 1980. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, Alimandan (penterjemah) Sosiologi Berparadigma Ganda, 2002 Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Schoorl, J.W, 1984, *Modernisasi. Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Di Indonesiakan oleh Sokadijo. Gramedia, Jakarta.
- Soemardjan Selo, 2009. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Komunitas Bambu, Beji Timur Depok.
- Suriasumatri Jujun, 1995. *Ilmu Dalam Perspektif*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Sztompoka, Piotr, 2005. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada Media. Jakarta.

INDEX



A

Abraham 37
agent of change 30
AGIL 35, 36, 37, 38
Alfred Marshall 33
Andre Gunder Frank V, 57, 58
Auguste Comte 31

B

Bierstedt 35
Bronislaw Malinowski 32
Brown 30, 32, 33
Bulmer 53

C

Campbell 27, 46
Chriss 47
Clark 51
Clyde Kluckhohn 59
Coleman 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Comte 26, 30, 31, 32
Coser 41, 42, 43, 44, 45
cultural borrowing 27
cultural lag 25, 26

D

Dahrendorf 40, 41
Denzin 45
Durkheim 30, 32, 33, 46

E

Emile Durkheim 33
Etzioni 12, 26, 65

F

F.H. Cardoso 57
Foundations of Social Theory 47

G

Garamsci 41
Garna 33
Giddens 26, 45, 54
Goodman 36, 38, 40, 42, 43
Green 27

H

Halivaland 13
Harper 38
Hechter 47, 69
Himes 27
homo economicus 53
Hunt 38

I

Immanuel Wallerstein 61, 62
Inkeles 1, 24, 60

J

Johnson 26, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 45

K

Kanazawa 47
Kanto 11, 14, 40, 65
Karl Marx 55
Kinloch 41, 43, 47

L

Laeyendecker 26, 46
Lauer 12, 13, 14, 38, 66
Lefebvre 41, 42
leuit 60
Liliweri 40
Lindenberg 47
Inkeles 26
Lukacs 41

M

Malinowski 30
Martin Roderick 33
Marx 26, 41, 43, 44, 55
Max Weber 1, 22, 33, 34, 54
Mills 41
Moore 12, 27
Mutahhari 26

N

Nasikun 34
Neo Marxian 42
Neo-Marxis 41, 56, 57

O

Ogburn 25, 26

P

Paloma 30, 31, 32, 33
Pareto 33, 41
Parsons 11, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45
Presbich 59
Priyono 35

R

Radcliffe-Brown 32
Raho 39
Reisman 41, 42
Ritzer 7, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 43,
45, 46, 66
Rose 26
Rosenberg 42, 43, 44
Rossides 26, 47, 54

S

Sistemik Konvensional 41
Soekanto 29
Soelaiman 25, 27, 28
Soemardjan 2, 25, 66
Sorokin 26
Spencer 26, 30, 31, 32

T

teori Dependensi 55, 56, 57, 61, 62
theoretical orientation 42, 45, 54
Theotonio Dos Santos 57
Tilly 47

V

Veblen 41
Veeger 31
Verstehen 46
Vilfredo Pareto 33

W

Wallerstein 61, 62
Wallis 26
Watergate 61
Weber 1, 22, 26, 33, 34, 45, 46, 47,
54
Weiner 60
Wibisono 26
Wrong 26, 46, 47

Z

Zablocki 50

TENTANG PENULIS



Rauf A. Hatu, Lahir pada tanggal 16 Desember 1963 di Gorontalo, sekarang sebagai dosen pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) tahun 1975. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) tahun 1979 dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Tridharma Gorontalo tahun 1982. Setelah lulus SMA melanjutkan pendidiki-

kan strata satu (S1) pada Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) IKIP Negeri Manado dan lulus tahun 1987. Pada tahun 1999 menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana (S2) Program Ilmu-Ilmu Sosial di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya dan pada Tahun 2010 menyelesaikan pendidikan Program (S3) Sosiologi Pedesaan pada Program Pascasarjana di Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang. Pada tahun 1996 menjadi Kepala Laboratorium IPS STKIP Gorontalo, tahun 2002-2006 sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan (PD III) pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, pada tahun 2006 pernah menjadi Sekretaris Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Negeri Gorontalo dan pada tahun 2011-2012 diminta oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (Balihristi) Provinsi Gorontalo, semasa mahasiswa penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado (1983). Tahun 1992 menjadi Sekretaris KNPI Kabupaten Gorontalo, tahun 2008 Sebagai Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Provinsi Gorontalo. Tahun 2008-2012 menjadi Presidium Korps Alamuni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Wilayah Gorontalo, serta tahun 2012 sebagai Sekretaris Dewan Pakar Korps Alamuni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Wilayah Gorontalo. Karya-karya ilmiah yang telah ditulis antara lain *Perubahan Huyula* dalam kehidupan masyarakat Gorontalo tahun 1999. *Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)* di Provinsi Gorontalo,

tahun 2005. Integrasi Sosial Masyarakat yang berbeda Etnis di Kecamatan Popayato tahun 1993. Bergabunglah dengan Rakyat (Sebuah Renungan bagi wajib pilih) tahun 2009. Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Petani Gorontalo (2013). Penulis beristerikan Dra. Hj. Reti Bala, MM dan dikaruniai 3 orang anak: Ratih IKawaty R. Hatu, Dewinta Rizky R. Hatu dan Mohammad Akbar R. Hatu

Sosiologi pembangunan secara umum lebih banyak mengkaji persoalan-persoalan pembangunan yang berlangsung di negara-negara berkembang atau lebih banyak kalangan akademis menggunakan istilah pembangunan Dunia ketiga. Menurut Budiman (1995) istilah Dunia Ketiga lebih diartikan sebagai negara-negara yang secara ekonomis masih miskin, atau negara-negara yang masih berkembang, tanpa melihat idiologinya.

Buku ini sebagai pengembangan kajian didasarkan pada hal-hal: Pertama, kurikulum Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Kedua; kajiannya lebih terfokus pada teori-teori yang berkaitan dengan masalah pembangunan di negara-negara berkembang yang meliputi teori modernisasi, teori ketergantungan, teori dependensi yang kesemuanya itu menjadi unit analisis terhadap kajian sosiologi pembangunan. Ketiga; bahan ajar ini diharapkan menjadi inspirasi bagi mahasiswa secara sadar berusaha meningkatkan kemampuan dan kualitas analisis keilmuannya, sehingga dimasa-masa datang mahasiswa dapat memberi kontribusi serta pembobotan terhadap peningkatan keilmuan pada umumnya khususnya dalam mempelajari, mengkaji dan mendalami berbagai permasalahan yang berhubungan dengan sosiologi pembangunan.



Rauf A. Hatu, lahir pada tanggal 16 Desember 1963 di Gorontalo, sekarang sebagai dosen pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) tahun 1975. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) tahun 1979 dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Tridharma Gorontalo tahun 1982. Setelah lulus SMA melanjutkan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) IKIP Negeri Manado dan lulus tahun 1987. Pada tahun 1999 menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana (S2) Program Ilmu-Ilmu Sosial di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya dan pada Tahun 2010 menyelesaikan pendidikan Program (S3) Sosiologi Pedesaan pada Program Pascasarjana di Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang.



Interpena

ISBN 978-602-1330-14-2

